

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 181/11/MOU/VIII/2022
NOMOR : 170/98/VIII/2022/DPRD
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si**
Jabatan : **Bupati Mamuju**
Alamat Kantor : **Jalan Soekarno Hatta No. 17 Mamuju**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2.
 - a. **Nama** : **AZWAR ANSHARI HABSI, SE, M.Si**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Mamuju**
Alamat Kantor : **Jalan Ahmad Yani, Mamuju**
 - b. **Nama** : **SYAMSUDDIN HATTA, SE**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju**
Alamat Kantor : **Jalan Ahmad Yani, Mamuju**
 - c. **Nama** : **H. ANDI DODY HERMAWAN, SE**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju**
Alamat Kantor : **Jalan Ahmad Yani, Mamuju**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Mamuju, 11 Agustus 2022

BUPATI MAMUJU

Selaku,

PIHAK PERTAMA




HJ. SITI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

PIMPINAN DPRD

KABUPATEN MAMUJU

Selaku,

PIHAK KEDUA



AZWAN ANSHARI HABSI, SE, M.Si
KETUA

SYAMSUDDIN HATTA, SE

WAKIL KETUA

H. ANDI DODY HERMAWAN, SE

WAKIL KETUA

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.
Nomor : 181/11/MOU/VIII/2022
Nomor : 170/98/VIII/2022/ DPRD
Tanggal : 11 AGUSTUS 2022

KABUPATEN MAMUJU
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan lanjutan dari kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dan DPRD Kabupaten Mamuju setelah kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dalam KU-APBD Tahun 2023. PPAS Tahun Anggaran 2023 memuat Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan serta berdasarkan program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2023 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada RAPBD Tahun Anggaran 2023. Dalam kapasitas tersebut, maka PPAS merupakan gambaran dan turunan dari hasil proses perencanaan pembangunan dengan skala prioritas pembangunan yang diagendakan dalam tahun 2023. Dengan tersusunnya PPAS, pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran tahun 2023 telah memiliki arah yang jelas untuk dipedomani oleh seluruh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2023, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kondisi keuangan dan pembiayaan daerah pada tahun kedua agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2021-2026. Konsekuensi logis yang muncul adalah dibutuhkan gambaran prioritas penganggaran yang dapat menjelaskan pembiayaan pembangunan Kabupaten Mamuju melalui prioritas program/kegiatan pada tahun kedua pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen PPAS APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

C. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Tahun 2023 Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
26. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi, dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomeklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050– 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2014 Tentang RTRW Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 01);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 01);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2);
46. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 20).

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mamuju, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maupun sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada pos penganggarnya masing-masing tergambar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Kabupaten Mamuju
Tahun Anggaran 2023

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	DASAR HUKUM
1	2	3	
4	PENDAPATAN	1.092.477.617.035,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.498.660.000,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.312.400.012,00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Daerah Kab. Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel; ✓ Peraturan Daerah Kab. Mamuju Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Restoran; ✓ Peraturan Daerah Kab. Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan; ✓ Peraturan Daerah Kab. Mamuju Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame; ✓ Peraturan Daerah Kab. Mamuju Nomor 14 Tahun 2010 2014 Tentang Pajak Air Tanah; ✓ Peraturan Daerah Kab. Mamuju Nomor 1 Tahun 2013/ Peraturan Bupati Mamuju Nomor 06 Tahun 2014 Tentang PBB-P2; ✓ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Parkir ✓ Peraturan Daerah kab. Mamuju nomor 1 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; ✓ Peraturan Daerah kab. Mamuju nomor 9 tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan; ✓ Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.036.744.856,00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Mamuju Nomor 20 tahun 1998 ✓ Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; ✓ Retribusi Izin Trayek ✓ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Hotel, Penginapan dan Rumah Makan;

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022	DASAR HUKUM
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ✓ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ✓ Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 ✓ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ✓ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Parkir. ✓ Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan ✓ Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.420.317.494,00	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.729.197.638,00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan barang Milik Daerah.
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	946.769.937.035,00	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	906.086.982.000,00	✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.682.955.035,00	✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.209.020.000,00	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)	44.209.020.000,00	✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.092.477.617.035,00	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan prioritas belanja daerah tahun 2023 didasarkan pada upaya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2023. Prioritas belanja disusun dalam rangka pencapaian target-target kinerja sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Prioritas belanja juga memperhatikan sinergitas program terhadap prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi kebijakan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah, serta prioritas program/kegiatan dan indikator kinerja.

Sinergitas prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dapat dilihat melalui beberapa tabel berikut ini:

1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Mamuju Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.1;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.2;
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3;
4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif		
			DINAS SOSIAL		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif		
			DINAS SOSIAL		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial		
			DINAS SOSIAL		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial		
			DINAS SOSIAL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Persentase Nilai Tukar Petani		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			persentase jumlah konsumsi energi dan protein terhadap standar nasional		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		
			DINAS KETAHANAN PANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah		
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan		
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase KSP/USP yang sehat		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase KSP/USP yang sehat		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase Nilai Investasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan		
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase kenaikan produksi budidaya		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase kenaikan produksi budidaya		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM dan Nilai Standar Layanan		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
			Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
			Predkat SAKIP Perangkat Daerah		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan		
				DINAS PERKEBUNAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERDAGANGAN	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Presentase kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Rumah Tangga Ber PHBS		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM & Nilai Standar layanan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Predikat SAKIP Perangkat Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja		
				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase teanaga kerja yang ditempatkan		
				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		
				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani		
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Unmetneed		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			"Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				DINAS PERKEBUNAN	
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya aparatur		
				DINAS PERKEBUNAN	
			IKM dan Nilai Standar lainnya		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
			Nilai Pengelolaan Keuangan Distransnaker		
				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
			Predikat SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
			Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana Dan Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	
			Cakupan Penunjang Pelayanan Pemerintah Daerah		
				KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase Berwawasan Kependudukan		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP BKPP		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Profesional ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Ormas yang terbina		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD, Pemenuhan Pelayanan Keuangan, Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian, Ketercapaian Pelayanan Umum serta Informasi Pelayanan OPD yang Disampaikan Kepada Publik		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Rumah Tangga Ber PHBS		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Prasarana Sumber Daya Air Yang Terbangun		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Yang Layak		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			0Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			0Presentase Permukiman yang tertata		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Presentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Indeks kualitas Penunjang Urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase fasilitas i pemenuhan izin parkir dalam wilayah kabupaten /kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase ketersediaan data layanan angkutan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dalam Kabupaten/Kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	
			Ratio Konektivitas Kabupaten/Kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Cakupan pelatih yang bersertifikat		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cakupan pembinaan atlet muda		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah atlet berprestasi		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah prestasi olahraga		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Persentase sarpras olahraga yang layak		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM dan Nilai Standar lainnya		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Nilai Pengelolaan Keuangan Bapenda		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah		
				INSPEKTORAT DAERAH	
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
			Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	
			Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				KANTOR KECAMATAN KALUKKU	
			Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	
			Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan		
				KANTOR KECAMATAN KALUKKU	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			teridentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase cakupan Penanggulangan Bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah disemua wilayah Kab Mamuju		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
			0Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan		
				SEKRETARIAT DPRD	
			Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan		
				SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			persentase penunjang urusanpemerintah daerah kabupaten/kota		
				KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
			Persentase Ketercapaian pelayanan Umum		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	
			Persentase Tersusunnya Penatausahaan		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	
			Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah		
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	
			Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur		
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan		
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Ormas yang terbina		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Tabel 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
73	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	48.475.739
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	545.891.870
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.703.800
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	27.216.400
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	2.208.246.335
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Persentase Nilai Tukar Petani		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	3.000.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			persentase jumlah konsumsi energi dan protein terhadap standar nasional		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	31.449.600
			Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	121.496.880
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	27.318.920
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.365.883.468
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	35.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase fasilitas i pemenuhan izin parkir dalam wilayah kabupaten /kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	16.336.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dalam Kabupaten/Kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	16.336.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	2.648.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	778.901.375
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	731.560
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Cakupan pelatih yang bersertifikat		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	69.187.500
			Cakupan pembinaan atlet muda		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	69.187.500
			Jumlah atlet berprestasi		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	69.187.500
			Jumlah prestasi olahraga		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	69.187.500
			Persentase sarpras olahraga yang layak		
				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	69.187.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan		
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase pengunjung museum		
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	24.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	29.436.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	87.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM dan Nilai Standar Layanan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	11.170.278.685
			Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	11.170.278.685
			Predikat SAKIP Perangkat Daerah		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	11.027.034.869
			Predkat SAKIP Perangkat Daerah		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	143.243.816
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			RASIO KETERSEDIAAN SARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	36.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			0Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan		
				DINAS PERKEBUNAN	16.316.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	5.400.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERDAGANGAN	3.350.131.680
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)		
				DINAS PERDAGANGAN	36.183.600
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		
				DINAS PERDAGANGAN	716.920.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantau		
				DINAS PERDAGANGAN	39.935.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase peningkatan volume ekspor		
				DINAS PERDAGANGAN	18.816.400
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERDAGANGAN	70.064.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN TAPALANG	1.413.600
			Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur		
				KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	12.255.500
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	24.501.200
74	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	2.993.980.000
			Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	3.755.779.892
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		
				DINAS KESEHATAN	59.370.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah disemua wilayah Kab Mamuju		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase Berwawasan Kependudukan		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22.184.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Unmetneed		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	86.249.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	45.430.500
75	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.500.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase cakupan Penanggulangan Bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108.500.000
			Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah disemua wilayah Kab Mamuju		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	167.500.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Pembinaan Wilayah Manajemen Kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	45.450.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	155.307.620
76	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD, Pemenuhan Pelayanan Keuangan, Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian, Ketercapaian Pelayanan Umum serta Informasi Pelayanan OPD yang Disampaikan Kepada Publik		
				DINAS KESEHATAN	360.000
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	16.461.996
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	16.461.996
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Jumlah Pengembang Yang tersedia sertifikat dan registrasi perumahan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10.681.520
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM & Nilai Standar layanan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	26.598.790
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.126.000
			Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	26.598.790
			Predikat SAKIP Perangkat Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	26.598.790
			Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108.327.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	34.365.100
			Indeks kualitas Penunjang Urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PERHUBUNGAN	4.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	13.500.000
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dalam Kabupaten/Kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	13.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	5.064.000
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.060.000
			"Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.060.000
			0Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana Dan Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	226.821.640
			persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yag terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	80.531.380
			Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana Dan Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	16.657.968.850
			persentasi kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	80.531.380
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				SEKRETARIAT DAERAH	203.036.800
			Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi		
				SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800
			Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritua, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800
			Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800
			Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700
			Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700
			Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700
			Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana		
				SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			0Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan		
				SEKRETARIAT DPRD	4.754.400.905
			Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan		
				SEKRETARIAT DPRD	16.230.193.423
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	2.927.557.936
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang urusan pemerintahan daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	117.256.200
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	60.513.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM dan Nilai Standar lainnya		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	874.000
			Nilai Pengelolaan Keuangan Bapenda		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	874.000
			Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	874.000
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	67.657.310
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.769.300
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.769.300
			Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.769.300
			Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.769.300
			Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.769.300
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	78.678.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP BKPP		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	115.380.680
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya		
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.000.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500
			Persentase hasil penelitian yang dikembangkan menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah		
				INSPEKTORAT DAERAH	18.535.950
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN SIMBORO	46.630.400
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				KANTOR KECAMATAN KALUKKU	4.823.864.873
			0Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	4.913.973
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	15.235.000
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	11.660.000
			Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				KANTOR KECAMATAN BONEHAU	12.611.200
			persentase Capaian urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	21.549.000
			persentase ketercakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	110.813.800
			Persentase Ketercapaian pelayanan Umum		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	898.855.792
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	143.690.000
			Persentase Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	89.480.000
			Persentase Tersusunnya Penatausahaan		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	4.500.000

				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	4.125.000
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	13.700.000
			Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah		
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	13.700.000
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum		
				KANTOR KECAMATAN TOMMO	49.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

				KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	7.000.000
			Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	7.072.650
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Tingkat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	33.422.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				KANTOR KECAMATAN BONEHAU	10.000.000
			Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	40.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.739.232.325
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.117.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60.000.000

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi berbasis potensi daerah						
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah					
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				Persentase KSP/USP yang sehat			
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	10.032.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Penunjang Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.162.057.040	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				Persentase Infrastruktur Pemukiman dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.794.807.640	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase bangunan gedung Pemerintah yang terbangun			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.230.073.420	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.355.013.600	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Rasio Tenaga Operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	660.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	326.668.580	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				0Cakupan Lingkungan Yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	356.646.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Jumlah Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
				Meningkatnya pengembangan kebudayaan			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	37.500.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	250.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	200.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Jumlah Kegiatan pelestarian cagar budaya			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	21.453.040	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Persentase pengunjung museum			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	24.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.108.900.613	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	127.495.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	637.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PERKEBUNAN	18.773.400	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya aparatur			
					DINAS PERKEBUNAN	266.847.400	
				IKM dan Nilai Standar Layanan			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	11.170.278.685	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	11.170.278.685	
				Predikat SAKIP Perangkat Daerah			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	11.027.034.869	
				Predkat SAKIP Perangkat Daerah			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	143.243.816	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan			
					DINAS PERKEBUNAN	273.989.225	
			RASIO KETERSEDIAAN SARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	36.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				0Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan			
					DINAS PERKEBUNAN	1.496.691.880	
				Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan			
					DINAS PERKEBUNAN	24.150.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan			
					DINAS PERKEBUNAN	11.500.400	
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	5.400.000	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase perizinan usaha pertanian			
					DINAS PERKEBUNAN	14.774.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina			
					DINAS PERKEBUNAN	306.196.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				persentase Capaian urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	5.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat						
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif			
				DINAS SOSIAL		629.679.600	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti			
				DINAS SOSIAL		357.823.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial			
				DINAS SOSIAL		1.157.450.000	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)			
				DINAS SOSIAL		2.295.549.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			
				DINAS SOSIAL		50.000.000	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1.860.395.325	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		28.117.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		716.313.744	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Ormas yang terbina			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		41.728.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		41.883.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	160.000.000		
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	13.979.436.312		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	458.446.800		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1.029.600.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	91.343.400		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	177.897.600		
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	47.015.040		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	74.280.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	12.480.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase jumlah sampah yang tertangani				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	20.521.031.400		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.784.400		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	29.325.800		
				Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	140.676.440		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase cakupan Penanggulangan Bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	502.300.000		
				Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah disemua wilayah Kab Mamuju				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	525.610.610		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Pembinaan Wilayah Manajemen Kebakaran				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	45.450.000		
3	3. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Prasarana Sumber Daya Air Yang Terbangun				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.979.885.780		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Sistem Drainase dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	925.631.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.986.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase fasilitas i pemenuhan izin parkir dalam wilayah kabupaten /kota			
					DINAS PERHUBUNGAN	16.336.000	
				Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dalam Kabupaten/Kota			
					DINAS PERHUBUNGAN	16.336.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.472.464.335	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase Nilai Investasi			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	55.000.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Persentase Peningkatan Jumlah Investor			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	71.460.040	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	421.933.960	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	47.880.000	
4	4. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat						
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				DINAS SOSIAL		182.280.000	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		320.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		200.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase ketersediaan data gender dan anak			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		164.850.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase Dekelra (desa/kelurahan,Kecamatan layak anak)			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.354.800.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		284.850.000	
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN		2.758.140.302	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa			
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN		27.656.320	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	21.433.400		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	25.900.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	72.265.200		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	778.901.375		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.807.273.383		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.769.737.500		
				Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.769.737.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Persentase kenaikan produksi budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.793.673.624		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	628.892.600		
				Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	628.892.600		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	240.994.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	10.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Tingkat Ketersediaan informasi industri				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	32.524.000		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	280.960.772.014		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	67.124.374.182		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.308.483		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Rasio Guru Murid				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	381.979.016		
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	40.359.375		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.973.170.500		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	660.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Yang Layak				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.012.416.000		
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	5.029.764		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	15.000.000		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	44.970.236		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	38.753.180		
				Tersedianya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	168.632.600		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	250.000.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	250.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	45.543.072	
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	86.809.070	
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	2.367.576.345	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
				Persentase Nilai Tukar Petani			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	3.000.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				persentase jumlah konsumsi energi dan protein terhadap standar nasional			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	48.448.800	
				Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	201.279.320	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	7.465.880	
				Capaian Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	12.441.970	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	27.318.920	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				Presentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	250.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.532.124.668	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.000.000		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	220.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.108.601.994		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase Berwawasan Kependudukan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	196.243.000		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase Unmetneed				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.235.402.900		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.480.013.900		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	685.164.999		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Cakupan pelatih yang bersertifikat				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.011.972.812		
				Cakupan pembinaan atlet muda				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.011.972.812		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah atlet berprestasi			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.011.972.812	
				Jumlah prestasi olahraga			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.011.972.812	
				Persentase sarpras olahraga yang layak			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.011.972.812	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi keperamukaan			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	106.164.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya aparatur			
					DINAS PERKEBUNAN	4.574.224.805	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				RASIO KETERSEDIAAN SARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	4.159.018.460	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				RASIO KETERSEDIAAN PRASARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	5.285.788.150	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	73.686.960	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	34.600.000	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase Perizinan Usaha Pertanian			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	11.933.000		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Penyuluh dan Kelompok Tani Terbina				
					DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	1.181.540.238		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS PERDAGANGAN	3.350.131.680		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)				
					DINAS PERDAGANGAN	36.183.600		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				
					DINAS PERDAGANGAN	716.920.000		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantau				
					DINAS PERDAGANGAN	39.935.400		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase peningkatan volume ekspor				
					DINAS PERDAGANGAN	18.816.400		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
					DINAS PERDAGANGAN	70.064.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				IKM dan Nilai Standar lainnya				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.869.708.443		
				Nilai Pengelolaan Keuangan Distransnaker				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.869.708.443		
				Predikat SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.869.708.443		
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Meningkatnya perencanaan kawasan transmigrasi				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	30.292.400		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Meningkatannya pengembangan kawasan transmigrasi				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	59.717.400		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi				
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	60.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah				
					INSPEKTORAT DAERAH	150.535.950		
				persentase penunjang urusanpemerintah daerah kabupaten/kota				
					KANTOR KECAMATAN MAMUJU	6.506.085.599		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					KANTOR KECAMATAN MAMUJU	14.330.500		
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					KANTOR KECAMATAN MAMUJU	37.297.800		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
					KANTOR KECAMATAN MAMUJU	2.040.993.240		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Program Koordinasi Ketentraman Umum				
					KANTOR KECAMATAN MAMUJU	4.560.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					KANTOR KECAMATAN MAMUJU	52.379.500		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					KANTOR KECAMATAN MAMUJU	8.578.000		
5			5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).					
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN	104.550.846.280		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	495.982.809.660	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten			
					DINAS KESEHATAN	8.630.475.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar			
					DINAS KESEHATAN	1.296.048.490	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase Rumah Tangga Ber PHBS			
					DINAS KESEHATAN	1.648.771.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS SOSIAL	10.891.302.665	
				Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.191.998.375	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.462.000	
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1.834.892.100	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan			
					DINAS PERHUBUNGAN	345.000.000	
		Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Pengawasan					
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya			
					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	48.854.800	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					KANTOR KECAMATAN SIMBORO	4.062.202.184		
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG	3.132.008.620		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					KANTOR KECAMATAN SIMBORO	26.860.200		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
					KANTOR KECAMATAN SIMBORO	787.268.500		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				
					KANTOR KECAMATAN SIMBORO	4.027.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					KANTOR KECAMATAN SIMBORO	77.600.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					KANTOR KECAMATAN SIMBORO	6.400.000		
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	51.756.600		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD, Pemenuhan Pelayanan Keuangan, Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian, Ketercapaian Pelayanan Umum serta Informasi Pelayanan OPD yang Disampaikan Kepada Publik				
					DINAS KESEHATAN	45.438.288.573		
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	41.392.238.266		
			Nilai kinerja pengelolaan keuangan BLUD					
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	22.000.000.000		
			Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi					
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	204.384.404		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur			
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	800.000	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	35.054.396	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8.227.044.966	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Presentase kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS			
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				0Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.929.560	
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.407.875.740	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	18.640.000	
				teridentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	41.440.600	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Luas Kawasan Permukiman Kumuh			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	299.293.449	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				0Presentase Permukiman yang tertata			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	263.066.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				0Cakupan Lingkungan Yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	226.585.230		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
				Jumlah Pengembang Yang tersedia sertifikat dan registrasi perumahan				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10.681.520		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				IKM & Nilai Standar layanan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.730.892.568		
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	22.437.600		
				Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.730.892.568		
				Predikat SAKIP Perangkat Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.730.892.568		
				Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.994.433.768		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	130.001.400		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah disemua wilayah Kab Mamuju				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	38.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	221.099.315		
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.138.383.383		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	302.215.926		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	142.079.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	104.097.290		
				Persentase layanan informasi administrasi kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	110.811.640		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Terlaksananya program pengelolaan profil kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.462.880		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.177.800		
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26.423.100		
				Indeks kualitas Penunjang Urusan pemerintahan daerah				
					DINAS PERHUBUNGAN	4.888.600.688		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota				
					DINAS PERHUBUNGAN	115.664.000		
				Persentase kepemilikan KIR angkutan umum				
					DINAS PERHUBUNGAN	20.000.000		
				Persentase ketersediaan data layanan angkutan				
					DINAS PERHUBUNGAN	20.959.000		
				Persentase tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe c				
					DINAS PERHUBUNGAN	20.000.000		
				Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
					DINAS PERHUBUNGAN	250.000.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dalam Kabupaten/Kota			
					DINAS PERHUBUNGAN	115.664.000	
				Ratio Konektivitas Kabupaten/Kota			
					DINAS PERHUBUNGAN	120.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	322.837.788	
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	104.158.404	
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.671.808.975	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Presentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	324.653.320	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menetapkan Layanan SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	67.625.600	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Presentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah			
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	52.058.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	79.538.000	
				0"Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.662.837.728	
				"Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	167.436.840	
				"Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah0			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.263.200	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	298.900.946	
				Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	298.900.946	
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	298.900.946	
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	298.900.946	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				0Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.376.150	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				0Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana Dan Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	1.255.107.990	
				persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	80.531.380	
				Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana Dan Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	16.657.968.850	
				persentasi kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	80.531.380	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
					SEKRETARIAT DAERAH	203.036.800	
				Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi			
					SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800	
				Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritua, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800	
				Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800	
				Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	7.404.335.800	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700		
				Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700		
				Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700		
				Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.093.643.700		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				0Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan				
					SEKRETARIAT DPRD	4.770.619.545		
				Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan				
					SEKRETARIAT DPRD	19.451.987.343		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	9.028.764.496		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Kualitas Penunjang urusan pemerintahan daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.642.928.179		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	290.465.140		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	472.020.930		
				Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	472.020.930		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	242.781.450	
				Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	472.020.930	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM dan Nilai Standar lainnya			
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.839.523.159	
				Nilai Pengelolaan Keuangan Bapenda			
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.839.523.159	
				Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah			
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.839.523.159	
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.531.125.314	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	152.542.110.388	
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	152.542.110.388	
				Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	152.542.110.388	
				Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	152.542.110.388	
				Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	152.542.110.388	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	309.221.970		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Deviasi Realisasi Pad Terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	851.283.990		
				Persentase Pad Terhadap Pendapatan				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	851.283.990		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Evaluasi SAKIP BKPP				
					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.184.840.390		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Indeks Profesional ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	435.572.600		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500		
				Persentase hasil penelitian yang dikembangkan menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500		
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indek Kualitas Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah				
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG	864.082.440		
				Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah				
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	2.637.600		
				Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah				
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	14.388.000		
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum				
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	86.725.100		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	183.295.500	
				Persentase Kualitas dan kuantitas serta menejemen pengelolaan Aparatur OPD			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	13.650.000	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	78.941.200	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	1.438.443.069	
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					KANTOR KECAMATAN KALUKKU	5.784.836.219	
				Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN PAPALANG	2.085.679.399	
				0Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	11.633.973	
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	1.625.633.849	
				ndeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	110.512.728	
				Cakupan Penunjang Pelayanan Pemerintah Daerah			
					KANTOR KECAMATAN BONEHAU	263.638.000	
				Persentase Capaian Urusan Pemerintah daerah			
					KANTOR KECAMATAN BONEHAU	1.653.628.401	
				Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					KANTOR KECAMATAN BONEHAU	57.749.200	
				Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	1.700.218.543	
				persentase Capaian urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	16.549.000	
				persentase ketercukupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	110.813.800	
				Persentase Ketercapaian pelayanan Umum			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	898.855.792	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	143.690.000	
				Persentase Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	89.480.000	
				Persentase Tersusunnya Penatausahaan			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	4.500.000	

					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	4.125.000	
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	50.700.000	
				Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	50.700.000	
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	108.400.000	
				Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	68.300.000	
				Persentase Kualitas dan kuantitas serta menejemen pengelolaan Aparatur OPD			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	12.000.000	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	67.320.000	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	1.762.525.414	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	101.860.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG	19.449.600	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	4.646.600	
				Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	23.101.600	
				Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan			
					KANTOR KECAMATAN KALUKKU	57.578.700	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					KANTOR KECAMATAN PAPALANG	23.576.000	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	6.979.750	
				Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	25.186.000	

					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	7.000.000	
				Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KANTOR KECAMATAN BONEHAU	60.766.189	
					KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	72.036.120	
				Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	7.072.650	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	15.000.000	
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
					KANTOR KECAMATAN TOMMO	13.420.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Persentase Penyelenggaraan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG	1.500.000.000	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KANTOR KECAMATAN KALUKKU	1.948.648.180	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					KANTOR KECAMATAN PAPALANG	9.259.000	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					KANTOR KECAMATAN PAPALANG	9.259.000	
				Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	22.359.960	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG	3.329.000	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	3.456.000	
				Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					KANTOR KECAMATAN KALUKKU	13.072.800	
				Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					KANTOR KECAMATAN PAPALANG	5.671.000	
				0Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertibn Umum			
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	17.836.000	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan			
					KANTOR KECAMATAN BONEHAU	11.500.000	
					KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	6.177.760	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG	8.436.400	
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	24.900.000	
					KANTOR KECAMATAN KALUKKU	22.974.800	
				Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					KANTOR KECAMATAN PAPALANG	27.082.000	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	13.148.000	
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KANTOR KECAMATAN BONEHAU	10.950.000	
				Persentase Tingkat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	33.422.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemrintahan Desa			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG	4.884.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	6.018.000	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			
					KANTOR KECAMATAN KALUKKU	11.690.000	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					KANTOR KECAMATAN PAPALANG	7.860.000	
				0Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	10.856.000	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					KANTOR KECAMATAN BONEHAU	22.000.000	
					KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	26.490.840	
				Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	40.000.000	

Tabel 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Skala	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	6 Laporan	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1892 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	7 Dokumen	1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Kab. Mamuju	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9 Laporan	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1199 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Laporan		1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan		1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan		1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Mamuju	
							1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	53 Persen	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD Terakreditasi	271 Sekolah	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit		
							1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		
							1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		
							1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		
							1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		
							1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit		
							1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang		
							1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		
							1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		
							1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang		
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit		
							1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	60 Paket		
							1.01.02.2.01.15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket		
							1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	30451 Paket		
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	52 Unit		
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2109 Siswa		
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	26 Paket		
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	311 Sekolah		
							1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	311 Sekolah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	33 Siswa		
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2833 Orang		
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang		
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	862 Orang		
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	311 Sekolah		
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	311 Sekolah		
							1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5 Orang		
							1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang		
							1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Terakreditasi	52 Sekolah		1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit		
							1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		
							1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	4 Ruang		
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang		
							1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang		
							1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		
							1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit		
							1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang		
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		
							1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		
							1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		
							1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		
							1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		
							1.01.02.2.02.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		
							1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	18 Paket		
							1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket		
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11 Paket		
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	3051 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	489 Siswa		
							1.01.02.2.02.33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	16038 Buku		
							1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3051 Paket		
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket		
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6756 Siswa		
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	67 Sekolah		
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	66 Siswa		
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1212 Orang		
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	293 Orang		
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	67 Sekolah		
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	67 Sekolah		
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5 Orang		
							1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		
							1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD Terakreditasi	136 Sekolah		1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit		
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit		
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		
							1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket		
							1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	25 Paket		
							1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	8230 Paket		
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	111 Siswa		
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket		
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	8699 Siswa		
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	286 Sekolah		
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	514 Orang		
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	96 Orang		
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	286 Sekolah		
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	286 Sekolah		
							1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3 Orang		
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terakredita	36 Lembaga		1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit		
							1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		
							1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		
							1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	6325 Paket		
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	101 Peserta Didik		
							1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 pAKET		
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6324 Peserta Didik		
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	59 Lembaga		
							1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	191 Orang		
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	151 Orang		
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	36 Lembaga		
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	59 Lembaga		
							1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	3 Orang		
							1.01.02.2.04.19 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		
							1.01.02.2.04.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		
							1.01.02.2.04.22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	59 Lembaga		
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	3500 Paket	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan	2 Kurikulum	1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	378 Buku		
							1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	150 Orang		
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal yang Ditetapkan	1 Kurikulum	1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	345 Buku		
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	1:20 Rasio	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kebutuhan Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	602 Orang 4737 Orang	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen		
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terakreditasi Minimal B	64.39 Persen	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Diterbitkan Izinnya	10 Sekolah	1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen		
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Diterbitkan Izinnya	345 Sekolah/Lembaga	1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	345 Dokumen		
							1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	345 Dokumen		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan											
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD, Pemenuhan Pelayanan Keuangan, Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian, Ketercapaian Pelayanan Umum serta Informasi Pelayanan OPD yang Disampaikan Kepada Publik Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 Persen 100 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 100 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah" Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju							
													1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen 1 Dokumen	Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan 4 laporan	Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan 4 Laporan	Kab. Mamuju	
										1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	208 orang/bulan 582 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"	12 dokumen 7 Dokumen	Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan 12 Laporan	Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan 12 laporan	Kab. Mamuju	
													1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	"Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
										1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	12 Laporan	Kab. Mamuju	
										1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100 Persen	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Mamuju							
							1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Mamuju							
							1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Mamuju							
							1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kab. Mamuju							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Mamuju	
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 Persen 100 %		1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	13 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket 1 paket	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen 2 dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189 Laporan 2 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen 100 %		1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	128 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	54 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit	100 Persen 100 %		1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan 12 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 12 laporan	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen		1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	34 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	130 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD RSUD	100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	100 Persen 100 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota" Terlaksananya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 100 %	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 paket		
							1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	"Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun"	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit 1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	"Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun"	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	"Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar"	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	"Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan" Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit 1 unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	"Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan"	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	"Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan" Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit 1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 jenis 7 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1 unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	117 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	"Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan"	1 unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	"Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan"	1 unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	"Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar"	11 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	147 Paket	Kab. Mamuju	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Terakreditasi Baik Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan di rumah sakit Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan di rumah sakit Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 100 % 100 %	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1137 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1330 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1365 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3980 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45717 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	55647 Orang	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2997 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3792 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	143 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1279 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	2747 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat"	5 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	5 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	8 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	3 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	6 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	573 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	"Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan"	573 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan"	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	23 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2300 Orang	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	"Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan"	20 Paket	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 unit	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 dokumen		
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	23 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota" Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 unit 1 unit	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	Kab. Mamuju	
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 100 Persen Terlaksananya Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100 %			1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	40 Persen	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	100 Persen	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	"Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)"	45 Orang	Kab. Mamuju		
							1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya 100 Persen Terpenuhinya SDM yang terlatih sesuai kompetensinya 100 %	100 Persen	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang	20 orang	Kab. Mamuju		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	80 Persen	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, U MOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100 Persen	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	"Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	51 Sarana	Kab. Mamuju	
			1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan aman, mutu, dan bermanfaat	100 Persen	1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
							1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Persen	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20 Dokumen	Kab. Mamuju		
			1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 Persen	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
			1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100 Persen	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 Persen	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	55 Persen	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100 Persen	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat"	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Standar dan telah di Evaluasi	100 Persen	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen pelaporan capaian realisasi keuangan yang tersusun	12 Dokumen	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	1.03.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 pasang	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	6 Kegiatan	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	8 Jenis	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Dokumen	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	4 Jenis	1.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebeleur Yang Disediakan	8 paket	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Mamuju	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit		
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kab. Mamuju	
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Prasarana Sumber Daya Air Yang Terbangun	100 Persen	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Pengaman Tebing dan Sungai dalam Kondisi Baik	25 Persen	1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1100 Meter	Semua Kab/Kota	
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	8055 Meter		
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	60 Persen	1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	270 Meter		
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang terpelihara	2214 Meter		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi	86,6 Persen	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem air minum yang terbangun	86 Persen	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	700 KK		
							1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses SPAM di Pedesaan	1000 KK		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	1 Persen	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	1 Persen	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS kewenangan kabupaten/kota yang tersusun	1 Dokumen		
							1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Yang Layak	65 Persen	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Air Limbah Domestik Yang Terbangun	75 Persen	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 KK		
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Penambahan Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	600 KK		
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase dalam kondisi baik	50 Persen	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun dan dipelihara	100 Persen	1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang terbangun	520 Meter		
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase perkotaan yang terpelihara	4000 Meter		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Pemukiman dalam kondisi baik	50 Persen	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pemukiman yang terbangun	100 Persen	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pemukiman yang terbangun	11974 Meter		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung Pemerintah yang terbangun	100 Persen	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Fasilitas Umum/Bangunan Gedung Pemerintah yang Terbangun	100 Persen	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200 Dokumen		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	57,72 Persen	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	jalan yang baik Persentase Peningkatan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	2000 km 3 Persen	1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen		
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang dibangun	10 km		
							1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7104 meter		
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1220 Meter		
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang Dibangun	3 Unit		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Persen	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Peserta	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang 0 Orang		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	100 Persen	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang tersedia	6 Dokumen	1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dilakukan sinkronisasi	6 Dokumen	1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	100 Persen	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Dokumen Pengawasan Yang dilaksanakan	100 Persen	1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	10 Dokumen		
							1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 PERSEN	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dok	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	2 Dok	1.04.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	302 Buah	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	713 Buah	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29960 lembar	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Eksemplar	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 kali	Kab. Mamuju	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Mamuju	
							1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Kab. Mamuju		
							1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Botol	Kab. Mamuju		
							1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju		
			1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18 Unit	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kab. Mamuju		
							1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Kab. Mamuju		
							1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	teridentifikasinya Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	100 Persen	100 Persen	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Data	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
									1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	
									1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	
									1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	
			1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terbangun / terehabilitasi	2 PERSEN	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 dokumen			
									1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah	
			1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun dan rumah khusus yang dikelola	100 PERSEN	1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan			
									1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	
			1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	9 Dok	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Laporan			
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	49,84 ha	49,84 ha	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	1 Dok	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 KALI	
			1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang di tangani	53 TITIK	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen			
									1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	
									1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0 Laporan	
									1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	
			1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentasi Kawasan Kumuh yang terbangun	10 PERSEN	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen			
									1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	2 TITIK	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Permukiman yang tertata	12 UNIT	12 UNIT	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rumah tidak layak huni yang di rehbilitasi	12 UNIT	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	80 Persen	80 Persen	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Perumahan yang memiliki PSU	25 PERUMAHAN	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas yang ditingkatkan dan direhabilitasi	10 Dokumen	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah ketersediaan PSU yang ada diperumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 PSU 0 Lokasi		
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		
							1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Dokumen 0 Laporan		
							1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen		
	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Pengembang Yang tersedia sertifikat dan registrasi perumahan	100 PERSEN	1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	5 pengembang	1.04.06.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	10 Laporan		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM & Nilai Standar layanan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 % 4 Dokumen 96 Skor 100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganaggaran, Capaian dan evaluasi Kinerja OPD Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 DokLaporan 4 Dokumen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA OPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	um lah Dokumen LPPD, LKPI, LAKIP , dan Perjanjian Kinerja yang disusun	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dok / laporan adm keuangan Jumlah dok / laporan adm keuangan Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok/Laporan 1 Laporan 100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang 26 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disusun	1 Laporan 15 Orang	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	12 Laporan 4 Dokumen	Kab. Mamuju	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah yang di sediakan Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan 100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Jenis 8 Paket	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Dokumen 3 Jenis	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Kegiatan 1 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2 Laporan 26 Kegiatan	Kab. Mamuju	
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Unit		1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Mamuju	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan 100 %		1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	1 Laporan 3 Rekening	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Urusan pemerintah daerah yang di pelihara Persentase barang milik daerah yg terpelihara	27 Unit 100 %		1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase barang milik daerah yg terpelihara	9 Unit	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Mamuju	
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Mamuju	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100 %	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	26 Kasus		
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 Kasus		
							1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	26 Dokumen		
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembayaran Tenaga Bantuan Operasional	300 Orang		
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100 Orang		
							1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen		
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %		1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10 Laporan		
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Laporan		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan Penanggulangan Bencana	50 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10000 orang	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi KIE Rawan Bencana / Jenis Bencana	50 orang		
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang Pelayanan/Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	50000 orang		1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana	1 Dokumen		
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	8 Jenis		
							1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan		
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dillegalisasi	1 Dokumen		
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	10000 orang		1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		
							1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang		
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50 %		1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	3 Dokumen		
							1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan bencana	20 Laporan		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pembinaan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok/Lap Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 Dok	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan yang disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan adm. Keuangan	26 Orang		1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
			1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah OPD	1 Dok		1.06.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %		1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jenis	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	3 Paket	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	1.06.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lap	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	7 jenis	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Mamuju	
							1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Mamuju	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	58 Persen	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	100 Persen	1.06.02.2.01.01 Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga Pada KAT yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK		
							1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga Pada KAT yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK		
				1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 Persen	1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penertiban izin undian berhadiah gratis dan pengumpulan uang dan barang	20 Dokumen		
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS masyarakat,perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PMKS	23 Jumlah PSKS	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Yang meningkatkan kemampuannya kewenangan Kabupaten /Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang 0 Orang		
							1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga TKSK	0 Orang 11 Orang		
							1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0 Keluarga 25316 Keluarga		
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	0 Lembaga 12 Orang		
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Lembaga		
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 Persen	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	5 Orang	1.06.03.2.01.01 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pekerja Migran yang di data	5 Orang		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100 Persen	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau (PMD 18)	230 Orang	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang mendapatkan Alat bantu dan alat bantu praga sesuai dengan kebutuhan kewenangan kabupaten/kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan,panti jompo,dan panti rehabilitasi	5 Orang 0 Orang 50 Orang		
							1.06.04.2.01.07 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akte kelahiran, surat nikah, kartu identitas anak	5 Orang		
							1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan gratis	18 Orang		
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Rujukan	6 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	6 Orang	1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	56,69 Persen	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	102 KPM	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Update data terpadu kesejahteraan sosial	25.316 Keluarga		
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan	24.019 Keluarga		
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	9.013 KPM		
								Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga		
							1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
								Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	300 Orang		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	100 Persen	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100 KK	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Jenis Bantuan Logistik bagi korban bencana	100 Orang		
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	100 Persen	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung siaga bencana	2 Kecamatan		
								Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung		
							1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang melakukan Kesiapsiagaan bencana	28 Orang		
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 Persen	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP	1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana & prasarana Taman Makam Pahlawan nasional kabupaten/kota	1 Dokumen		
							1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah penerima Bantuan bagi pahlawan perintis kemerdekaan	1 TMP		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 Persen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 Persen	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		
							2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	60 Perusahaan		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	100 Persen	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5 Lembaga	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0 Orang		
							2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga		
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan		
				2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan	10 perusahaan	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan		
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	100 Persen	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Yang mendapatkan pekerjaan	100 Persen	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang		
							2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang		
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 Dokumen	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		
							2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	70 Orang		
							2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	10 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Yang mendapatkan pekerjaan	100 Pekerja	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang			
			2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab./ Kota	1 Dokumen	2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi	0 Dokumen			
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100 Persen	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 Dokumen	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan		
						2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan	10 Perkara	2.07.05.2.02.02 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		
						2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara			
						2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 Orang	0 Orang		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja DPPP	100 Persen	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan DPPP	100 Persen	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian DPPP	100 Persen	2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum DPPPA	100 Persen	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	2.08.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa pelayanan kantor	100 Persen	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Mamuju	
							2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 uNIT	Kab. Mamuju	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	25 Persen	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	25 Persen	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 OPD		
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30 Persen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 0 Organisasi		
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 Persen	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	80 Orang		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100 Persen	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	6 Persen	2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 Persen	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang		
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100 Persen	2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	35.16 Persen	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang sudah mengetahui dan memahami tentang SOP kebijakan yang berkesetaraan gender serta perlindungan anak, dan kualitas keluarga	100 Persen	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang sudah memenuhi standar tentang kualitas keluarga yang berkesetaraan gender	16 Lembaga	2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	16 Lembaga		
							2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100 Persen	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpilah Perempuan dan Anak	1 Dokumen	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekelra (desa/kelurahan,Kecamatan layak anak)	33.33 Persen	2.08.06.2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang sudah sesuai standar pelayanan tentang pemenuhan hak anak baik dari pemerintah, masyarakat dan swasta	16 Lembaga	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi		
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang sudah mendapatkan tentang penguatan peningkatan layanan kualitas hidup anak	15 Lembaga	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 0 Dokumen		
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100 Persen	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 Persen	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah		
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		
							2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan 5 Layanan		
							2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD	1 DOKUMEN	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD	1 DOKUMEN	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	100 Persen	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.09.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetak & Penggandaan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis rapat koordinasi dan konsultasi OPD	2 Jenis	Kab. Mamuju	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	Kab. Mamuju	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	4 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar pajaknya	15 Unit	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	1 Unit	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	4 Unit	Kab. Mamuju	
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Nilai Tukar Petani	100 Persen	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis infrastruktur	100 Persen	2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	15 Unit		
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	100 persen	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Kelompok Bahan pangan Yang Dihitung Angka Ketersediaan Energi dan proteinnya (Kkal/Kap/Hr)	11 Komoditi		
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Komoditi Pangan yang Dipantau Situasi Pasokan & Harganya	9 Komoditi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia Centre/TTIC(%)	20 Persen		
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	100 Persen	2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Dokumen Inventarisasi Data sumber Daya pangan	1 Dokumen			
						2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Berbentuk Beras	20000 Kg			
						2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung yang difasilitasi	6 Unit			
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan	1 Dokumen	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Kelompok Pangan Yang Harus Dipenuhi Sebagai Asupan Gizi Perorangan Perhar	9 Kelompok			
						2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Tani / Klp Wanita Tani (KWT) yang Dibina	5 Kelompok			
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100 Persen	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan FSVA	1 Dokumen	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Wilayah Yang Dipantau untuk Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	11 Kecamatan		
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Giz	1 Dokumen	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Yang Dihitung Tingkat Kerawanan pangan dan Gizinya	11 Kecamatan		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)	85 persen	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar yang Aman	10 Komoditi		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentse Penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum	86 PERSIL	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tanah maysarakat yang telah diganti rugi	86 PERSIL	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Persil		
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang bersal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	87 PERSIL	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subyek dan Obyek redistribusi yang telah di tetapkan	2 persil	2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Dokumen		
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan	100 % PERSIL	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Tanah yang sesuai rencana tata ruang wilayah	100 PERSIL	2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Renja Pokok dan Perubahan yang disusun	0 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD yang 1 Dokumen disusun	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD yang 1 Dokumen disusun	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPI, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang 0 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Administrasi Tugas Asn	0 Dokumen 12 Laporan	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan tahun 0 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen 0 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Adiministrasi Barang Milik Daerah	100 Persen		2.11.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) yang disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan 0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan 0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah (BMD)	0 Laporan 1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang ditata Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 0 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	0 Orang 2 Orang	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis Per-UU	0 Orang 15 Orang	Kab. Mamuju	
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis 0 Paket	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Jenis 0 Paket	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 Paket 5 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Jenis 0 Paket	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis 0 Paket	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis 0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang mendapatkan fasilitasi layanan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Orang 0 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan 0 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen		2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Jenis 0 Unit	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit 0 Unit	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit 0 Unit	Kab. Mamuju	
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Orang	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen		2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	Kab. Mamuju	
							2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Mamuju	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	Kab. Mamuju	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 Persen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian RPPLH	1 Dokumen	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian RPPLH	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Pengendalian	30 Usaha	Kab. Mamuju	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 Dokumen	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	55 Persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan hidup	3 Sampel	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah pemantauan kualitas lingkungan	3 Sampel	Kab. Mamuju	
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Kecamatan	Kab. Mamuju	
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laboratorium yang di kelola	1 Laboratorium	Kab. Mamuju	
								Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah penanggulangan pencemaran lingkungan hidup	1 Kecamatan	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	Kab. Mamuju	
								Jumlah sosialisasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan	Kab. Mamuju	
							2.11.03.2.02.02 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disolasi	0 Lokasi	Kab. Mamuju	
								Jumlah tidak tercemar, tercemar ringan dan tercemar berat	1 Kecamatan	Kab. Mamuju	
							2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penanganan pencemaran lingkungan hidup	1 Kecamatan	Kab. Mamuju	
								Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	0 Titik	Kab. Mamuju	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemulihan pencemaran lingkungan hidup	1 Kecamatan	2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	10 Kali	Kab. Mamuju	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	0.01 Persen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen profil hayati sebagai data dasar penetapan venema hayati	100 Persen	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Luas Kawasan Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Hektar	Kab. Mamuju	
									0 Ha	Kab. Mamuju	
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi Pengelolaan RTH Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Lokasi	Kab. Mamuju	
									0 Ha	Kab. Mamuju	
							2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Penyediaan Pohon Yang di tanam	13000 Pohon	Kab. Mamuju	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Dokumen Izin Penyimpanan Limbah B3	100 Persen	2.11.05.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Perseetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Perseetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.11.05.2.02.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Perseetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	84 Persen	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	116 Usaha	2.11.06.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	116 Usaha	Kab. Mamuju	
							2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti pelatihan PPLH	2 Orang	Kab. Mamuju	
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Perseetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kab. Mamuju	
								Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin dan/atau dokumen lingkungan yang diawasi	16 Usaha/Kegiatan		
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	100 Persen	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Desa	83 Desa	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA	10 MHA	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah MHA	10 MHA		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 Persen	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0 Lembaga	Kab. Mamuju	
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan	3 Kegiatan	Kab. Mamuju	
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen		
							2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	Kab. Mamuju	
								Jumlah Penyuluhan	10 Kali		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	100 Persen	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan	3 Penghargaan	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi	20 Lembaga	Kab. Mamuju	
								Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	100 Persen	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditangani	10 Pengaduan	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	0 Dokumen	10 Pengaduan terhadap PPLH yang dilayani	Kab. Mamuju	
							2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	0 Dokumen	10 Sanksi		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72 Persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Timbulan sampah yang ditangani	45.037 Ton	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen		
							2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	0 Laporan	182 Orang		
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 Ton	20 Unit	Kab. Mamuju	
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	1 Kegiatan	Kab. Mamuju	
							2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	25 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	2000 Buah	Kab. Mamuju	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		Kab. Mamuju	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	5 Laporan	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Orang		Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju		
			2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	2.12.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Mamuju		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan administrasi umum perangkat daerah	10 Laporan	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kab. Mamuju		
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kab. Mamuju		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Mamuju		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Mamuju		
						2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 Persen	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase hasil layanan Kependudukan	100 Persen	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1635 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3654 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18534 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	14094 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk	8 Kegiatan	2.12.02.2.03.01 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	Semua Kab/Kota		
			2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk"	3 Laporan	2.12.02.2.04.01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 Persen	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase hasil layanan Pencatatan Sipil	100 Persen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	306 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3000 Layanan	Kab. Mamuju	
			2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen yang dimanfaatkan dan disajikan dalam database kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen yang dimanfaatkan dan disajikan dalam database kependudukan	100 Persen	2.12.04.2.03.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	8 Kegiatan	2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terlaksananya program pengelolaan profil kependudukan	1 Dokumen	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	0,79 indeks	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	6 Laporan	2.13.01.2.02.03 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah Pada SKPD	2 Laporan	2.13.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9 Laporan	2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 Paket	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	56 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Laporan	2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit 5 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Laporan	2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang terpelihara	12 Laporan	2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Mamuju	
							2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	Kab. Mamuju	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	50 Desa	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	30 Desa	2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	2 Dokumen		
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	56 Persen	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparat Desa yang mengikuti Bimtek/pelatihan	176 Org	2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	88 Dokumen		
							2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	9 Dokumen		
							2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	88 Dokumen		
							2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	30 Dokumen		
							2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	88 Laporan		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	87,72 Persen	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	264 Lembaga	2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	264 Lembaga		
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30 Laporan		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B Nilai	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan yang disusun	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPI, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi Gaji dan Tunjangan	53 orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disusun	12 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran yang disusun	3 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.14.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Asset SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	112 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.14.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	5 orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	102 Unit	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	Kab. Mamuju	
							2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	Kab. Mamuju	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan	55 Persen	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan kab.kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1 kali	2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	100 Persen	2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	11 kecamatan	Kab. Mamuju	
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	11 kecamatan	Kab. Mamuju	
							2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	7 kecamatan	Kab. Mamuju	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed	8 Persen	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Lokal	100 Persen	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi		
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	10 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Kualitas Kader IMP	100 Persen	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	737 Orang	Kab. Mamuju	
				2.14.03.2.03 Pengendalian Penganggaran, dan Evaluasi Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perencanaan, Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Ratio Akseptor KB	100 Persen 74.3 Persen	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya peran serta organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persen		2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	1 laporan	Kab. Mamuju	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	55 Persen	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB Meningkatnya Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	81.5 Persen 78.3 Persen 72.5 Persen 90.9 Persen	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	5 Kelompok	Kab. Mamuju	
							2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Sarana	Kab. Mamuju	
							2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Orang	Kab. Mamuju	
							2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 laporan	Kab. Mamuju	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang di susun	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang di susun	1 dokumen	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang di susun	0 Dokumen 1 dokumen	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD yang di susun	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Di susun	0 Dokumen 1 dokumen	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD,LKPJ,LAKIP, dan Perjanjian Kinerja yang di susun	4 dokumen	Kab. Mamuju	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Di Bayarkan	45 orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 orang	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 laporan	Kab. Mamuju	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah	1 Dokumen	2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	Kab. Mamuju	
				2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Indeks kualitas Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	0 Laporan 2 Jenis		
							2.15.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan		
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang Dibutuhkan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Jenis 0 Unit	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 pasang 0 Paket	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kab. Mamuju	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BANGunan Kantor	7 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247 laporan	Kab. Mamuju	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.07.06 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Jenis	Kab. Mamuju	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 orang	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	5 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Mamuju	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara	1 Unit	Kab. Mamuju	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio Konektivitas Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Induk jaringan Induk LLAJ dalam Kabupaten/kota	1 Dokumen	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk/Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di jalan Kupaten / kota	100 %	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JumlahPembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Titik		
							2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit		
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3 Unit		
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit		
							2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang dipelihara	130 Unit		
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang dipelihara	2 Titik		
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	0 Unit		
							2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit		
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terkelolanya terminal Tipe C	100 %	2.15.02.2.03.02 Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit		
							2.15.02.2.03.02 Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Pembangunan Gedung Terminal	1 Unit		
							2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang dipelihara	1 Unit		
							2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Terminal yang dipelihara	1 Unit		
							2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah ASN yang mengikuti Pengelolaan Terminal	1 Orang		
							2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang		
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya izin penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Kabupaten/kota	27 titik	2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen		
							2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 Unit		
							2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	27 titik		
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselaksananya Pengujian Kendaraan bermotor	100 %		2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit		
							2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Orang		
								Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang		
							2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang di registrasi	500 Unit		
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumah Laporan Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan kabupaten/kota	27 Kegiatan		2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas	13 Unit		
							2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	27 Laporan		
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orng dan/atau barang antar ota dalam 1 (satu) kabupaten /kota	1 Dokumen		2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
			2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten kota dalam 1 (satu) daerah	1 Dokumen		2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		
			2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokuemn		2.15.02.2.16.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	35 Persen	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun Jumlah pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun	1 Unit 1 Unit	2.15.03.2.12.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di bangun	1 Unit		
							2.15.03.2.12.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	15 Kali		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100 Dokumen	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA yang disusun Jumlah Dokumen LPPD, LKPI, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang disusun	2 Dokumen 4 Dokumen 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Jumlah Laporan keuangan yang disusun Jumlah Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD yang dibayarkan	34 Orang 12 Laporan 10 Orang		2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen 10 Orang	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas yang diadakan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklatpim	44 Pasang 1 Orang		2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan logistik yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Laporan Hasil Rapat Luar dan dalam Daerah yang dikoordinasikan	3 Jenis 2 Jenis 21720 Lembar 27 Jenis 2 Laporan	2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Jenis 0 Paket	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21720 Lembar	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yng diadakan Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang tersedia	2 Jenis 1 Unit	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	Kab. Mamuju	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Jenis 11 Orang 3 Jenis	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor terpelihara Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit 7 Unit 3 Jenis	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aduan dan Aspirasi Publik melalui Media Online Jumlah Kemitraan Komunitas yang dibina Jumlah Kerjasama (Sponsorship) dengan Media Massa Jumlah Konten Informasi yang dipublikasikan melalui media luar ruang Jumlah Laporan Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola Jumlah Pelayanan Informasi Publik melalui mobil keliling Jumlah SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	50 Aduan 20 Kelompok 20 Media 50 Konten 360 Laporan 1 Media 50 Kali 5 Orang	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan dan Aspirasi Publik melalui Media Online Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50 Aduan 0 Dokumen	Aspirasi Publik	
							2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	360 Laporan		
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Konten Informasi yang dipublikasikan melalui media luar ruang	0 Dokumen 50 Konten		
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola	0 Dokumen 1 Media		
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Pelayanan Informasi Publik melalui mobil keliling	0 Dokumen 50 Kali		
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	20 Media		
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang		
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20 Kelompok		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menetapkan Layanan SPBE	100 %	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan e-government Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan ekosistem SPBE Jumlah OPD yang menyimpan data pada pusat data pemerintah daerah Jumlah Pengunjung Website Pemda Jumlah titik ruang terbuka publik yang disediakan jaringan internet oleh diskominfo	1 Aplikasi 2 Laporan 1 Laporan 44 OPD 360000 Pengunjung 5 Titik	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Pengawasan penyelenggaraan E-Government	0 Dokumen 2 Laporan		
							2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang menyimpan data pada Pusat data Pemerintah Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	44 OPD 0 Unit		
							2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Pengunjung Website Pemda	0 Dokumen 360000 Pengunjung		
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi Yang dikembangkan	1 Unit 1 Aplikasi		
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah titik ruang terbuka publik yang disediakan jaringan internet oleh diskominfo	5 Titik		
							2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Mamuju	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Mamuju	
							2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	21 Persen	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	14 Unit	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Unit Koperasi	Kab. Mamuju	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	11 Persen	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	14 Unit Koperasi	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	14 Unit Usaha	Kab. Mamuju	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10 Persen	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	17 Unit Koperasi	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	Kab. Mamuju	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	7 Persen	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi dukungan pembiayaan dan pemasaran yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Usaha Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Unit Usaha	Kab. Mamuju	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5 Persen	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang terdata	5 Persen	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1400 Unit Usaha		
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	950 Unit Usaha	Kab. Mamuju	
							2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	70 Unit Usaha	Kab. Mamuju	
							2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 Orang	Kab. Mamuju	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	25.5 Persen	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang dikembangkan melalui fasilitas	18 Persen	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	19 Unit Usaha	Kab. Mamuju	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju		
						2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Mamuju		
						2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Mamuju		
			2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju		
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian	100 Persen	2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 Dokumen	Kab. Mamuju		
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 Persen	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Mamuju		
						2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju		
						2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kab. Mamuju		
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen	2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Mamuju		
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Mamuju		
						2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Mamuju		
						2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju		
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 Persen	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	Kab. Mamuju		
						2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Mamuju		
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	340 Milyar Rupiah	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	100 Persen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen		
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100 Persen	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	44 Investor	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100 Persen	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Persen	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100 Persen	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	85 Pelaku Usaha		
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha		
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24 Orang		
							2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan Usaha		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	50 Persen	2.18.05.2.01 Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	75 Persen	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha		
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	260 Pelaku Usaha		
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	100 Persen	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100 Persen	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	13.32 Persen	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	6 Orang 11 Orang 100 Orang	2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukaelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukaelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 Orang		
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	71 Orang		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	21 Orang 25.15 Persen	2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	20 Orang		
							2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Persentase sarpras olahraga yang layak	39.87 Persen 51.75 Persen 8 Orang 6 Prestasi 0.07 Persen	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	44 Orang	2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen		
							2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit		
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2 Penyelenggara	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah olahraga prestasi yang dikembangkan dan dibina	6 Cabang Olahraga	2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	7 Orang		
							2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	100 Orang		
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi OR yang dibina dan dikembangkan	11 Lembaga	2.19.03.2.04.01 Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen		
							2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Pembinaan dan Pengembangan OR Rekreasi	2 Gedung Olahraga	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen		
							2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan	100 Orang	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah event kepramukaan yang dilaksanakan	1 Event	2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	30 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi Jumlah Radiogram yang diterima dan dikirim Jumlah SDM Keamanan Informasi yang mengikuti Diklat	50 Orang 60 Radiogram 1 Orang	2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Keamanan Informasi yang mengikuti diklat	0 Laporan 1 Orang		
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	0 Laporan 50 Orang		
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Jumlah Radiogram yang diterima dan dikirim	0 Perangkat Daerah 60 Radiogram		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi elektronik yang diterima dan dikirim	150 Surat	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Elektronik yang diterima dan dikirim	150 Surat			
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 PERSEN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	100 PERSEN	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek			
							2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	10 Lembaga			
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	100 Persen	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek			
							2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan			
							2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Orang/Kelompok			
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kab/Kota	100 Persen	2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek			
							2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang			
							2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit			
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	6 Kelompok	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	100 Persen	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang			
							2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Kelompok			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	20 Persen	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100 Orang			
							2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Kegiatan pelestarian cagar budaya	10 Persen	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 Persen	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek			
							2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	0 Objek			
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 Persen	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Cagar Budaya			
							2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	0 Objek			
							2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek			
				2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.22.05.2.03.01 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek			
							2.22.05.2.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan			
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum	4,3 Persen	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100 Persen	2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0 Unit			
							2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	0 Orang			
							2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5,3 persen			
							2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Buah			
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	34 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi barang milik daerah pada OPD	100 Persen		2.23.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	1 Laporan	Kab. Mamuju	
			2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		2.23.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	1 orang	Kab. Mamuju	
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	10 paket	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	10 paket	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	10 paket	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	2 paket	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen		2.23.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"	1 unit	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	2 Unit	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 Persen		2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Mamuju	
							2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	2 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	10% Persen 0,21% Persen 1:17 Rasio 1:19.000 Rasio	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Rasio perpustakaan persatuan penduduk	100 Persen 100 Persen 10 Rasio	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan		
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		
							2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan		
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45 Orang		
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200 Eksemplar		
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar		
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	100 Persen	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus		
							2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota"	3 Orang		
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan		
							2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya"	3 Orang		
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	100 Persen	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah kuno yang diakuisisi yang ada di Mamuju	10 Dokumen	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	"Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno"	10 Orang		
							2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 exl		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	9,5% Persen	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	5 Dokumen	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5 Berkas		
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	"Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan"	5 Berkas		
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota"	5 Laporan		
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 Persen 100 Persen	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 arsip		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	"Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100 Persen	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	"Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN"	100 Pengguna		
							2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota"	1 Laporan		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	70 Persen	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang Dimusnahkan sesuai NSPK	100 Persen	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	"Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun"	34 Arsip		
							2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	"Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan"	34 Berkas		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang diselatakan sesuai NSPK di provinsi	10 Persen	2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar			
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	80 Persen	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan penggunaan arsip tertutup	100 Persen	2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dipenuhi	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang dipenuhi	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang dipenuhi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan yang dipenuhi	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dipenuhi	8 Dokumen	Kab. Mamuju	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang di bayarkan	43 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen yang diverifikasi	1 Dokumen		
							3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen penatausahaan yang disusun	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	3.25.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 Persen	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan Peralatan kelengkapan administrasi kantor	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		
							3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	30 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen	3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor	6 Unit	Kab. Mamuju	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di bayarkan	100 Persen	3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	5 Jenis	Kab. Mamuju	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 Persen	3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	14 Unit	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	35 Unit	Kab. Mamuju	
							3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 Unit	Kab. Mamuju	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	12.9 Persen	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarpras perikanan tangkap	1100 Unit	3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data/informasi perikanan yang dipublikasikan beserta dukungan terhadap stunting,peta jalan inflasi daerah yang mendukung kegiatan dari sumber anggaran DAK dan DAU	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
		Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	11.76 Persen								

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah pengadaan prasarana perikanan tangkap	900 Unit	Kab. Mamuju	
							3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah pengadaan sarana perikanan tangkap	200 Unit	Kab. Mamuju	
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi dalam pengembangan kapasitas dan kelembangan nelayan	195 Orang		3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang mendapatkan sertifikat tanah, asuransi jiwa dan kartu KUSUKA	150 Orang	Kab. Mamuju	
							3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terbentuk	30 Kelompok	Kab. Mamuju	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi budidaya	3.92 Persen	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya fasilitasi dalam pengembangan kapasitas dan kelembangan nelayan Tersedianya sarpras budidaya perikanan	195 Orang 86 Persen	3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembudidaya yang dibina dalam peningkatan SDM/mtuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	45 Kelompok	Kab. Mamuju	
							3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya yang diberikan pendampingan oleh kementerian, penyuluh dan instansi terkait	45 Kelompok	Kab. Mamuju	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya sarpras budidaya perikanan	25 Paket	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana perikanan budidaya	25 Paket	Kab. Mamuju	
							3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) terpantau kesehatan ikan dan lingkungan budidayanya	45 Kelompok	Kab. Mamuju	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	4.88 Persen 2.24 Persen	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	45 Kelompok	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	Kab. Mamuju	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peresentase kenaikan komsumsi ikan daerah Peresentase kenaikan produk olahan hasil perikanan	4.88 Persen 2.24 Persen	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan promosi dan sosialisasi gerakan makan ikan (GERMANI) dalam peningkatan konsumsi ikan daerah dan pencegahan stunting	1 Kegiatan	Kab. Mamuju	
							3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pemasar dan pengolahan hasil perikanan	100 Unit	Kab. Mamuju	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan	100 Persen	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	3.26.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	220 Orang	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337 Kegiatan	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen	3.26.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Mamuju	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yg terpelihara	100 Persen	3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Mamuju	
							3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,4 Persen	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	100 Persen	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
							3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		
							3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	presentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota	100 Persen	3.26.02.2.02.01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
							3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Kawasan		
							3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit		
							3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
							3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	100 Persen	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit		
							3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan		
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Tanda daftar usaha pariwisata	100 Persen	3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen			
						3.26.02.2.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen			
						3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0 Laporan			
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	25 Persen	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Persen	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Media		
						3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Orang			
						3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen			
						3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Lembaga			
						3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0 Dokumen			
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspos, berpromosi dan berinteraksi	8 Kelompok	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspos, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	3.26.04.2.02.03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Laporan		
						3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen			
						3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen			
						3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Dokumen			
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	15 Persen	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase n peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Persen	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0 Orang		
						3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang			
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif	100 Persen	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang		
						3.26.05.2.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0 Laporan			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM dan Nilai Standar Layanan Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya aparatur Predkat SAKIP Perangkat Daerah	85 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 8 Predikat Daerah	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen			3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan 152 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.02.04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 Persen Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen			3.27.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 1 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen			3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52 Paket	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52 Dokumen	Kab. Mamuju	
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas 100 Persen			3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 20 Paket	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket 3 Paket	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket 1002 Exemplar	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan 438 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen Persentase tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen			3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan 3 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan dan Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Orang 4 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik 100 Persen Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen			3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit 2 Unit	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Mamuju	
							3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan RASIO KETERSEDIAAN SARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN	90 Persen 100 Persen	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersalurkan Persentase sarana pertanian yang tersedia	100 Persen 100 Persen	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah sarana pertanian yang diberikan/jumlah Sarana komoditi yang disediakan Jumlah Sarana Pertanian Yang Tersalurkan	0 Laporan 3 Komoditi 4 Jenis		
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Jenis Pengadaan Mesin Pascapanen Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang tersedia Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Jenis 5 Jenis 0 Laporan		
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan alat kesehatan hewan	100 Persen	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Sosialisasi calon penerima Ternak	2 Kegiatan		
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Jenis		
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Sarana Peternakan yang tersalurkan	100 Persen	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak Jumlah Pakan Ternak	1494 Ekor 79 Zak		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan RASIO KETERSEDIAAN PRASARANA PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN	100 Persen 100 Persen	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data komoditas dan peta perkebunan Persentase prasarana pertanian yang di kembangkan	100 Persen 100 Persentase	3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen		
							3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan 4 Laporan		
							3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase prasarana perkebunan yang disediakan	100 Persentase 90 Persen	3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit 13 Unit		
							3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah pembangunan Kandang Hewan	1 Unit		
							3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pengadaan Hand Sprayer Jumlah Pengadaan Hand Traktor Jumlah Pengadaan Pompa Air Jumlah Pengadaan Pupuk Urea Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	180 Unit 6 Unit 2 Unit 769 Kilo 2 Unit		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	100 Persen	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Ternak Yang Terlayani	100 Persen	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10 Kecamatan		
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	600 Ekor		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	100 Persen 70 Persen	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase pengendalian OPT dan bencana alam	100 Persen 70 Persen	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha 10 Kecamatan		
							3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Kecamatan		
							3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Ha		
							3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	10 Kecamatan		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian	75 Persen	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Usaha Perkebunan yang di fasilitasi	75 Persen	3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	14 Dokumen		
							3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	201 Dokumen		
							3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Jumlah Usaha yang diawasi	100 Persen	3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	10 Kecamatan		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina Persentase Penyuluh dan Kelompok Tani Terbina	85 Persen 100 Pertanian	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	PERSENTASE PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN Persentase penyuluhan Pertanian	100 Persen 85 Persen	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit 10 BPP		
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit 5 Unit		
							3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah perangkat daerah	3 dokumen	3.30.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1 dokumen	3.30.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	4 dokumen	3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 jenis	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	Kab. Mamuju	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jumlah Tenaga Kontrak	10 orang	3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah urusan pemerintahan yang dipelihara	6 unit	3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Mamuju	
							3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kab. Mamuju	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	15,55 %	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah izin pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	20 surat rekomendasi	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	2 surat rekomendasi	3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	75.09 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Pengelola	100 kali	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan Pengelola	60 kali		
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan Pengelola	40 kali		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantau	7 %	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Bapokting yang dipantau	28 jenis	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan	24 kali		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyalurannya	40000 ton	3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyalurannya	10 kecamatan		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	3 %	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	5 kali	3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pengelola	1 Kali		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	83.69 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP, yang diawasi, ditera, dan tera ulang	150 unit	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	150 Kali		
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang diawasi	11 kecamatan		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	10 Persen	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100 Persen	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri	4 Dokumen	3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri	100 Persen	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan Industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri terdaftar dalam SIINas	4 Persen	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM dan Nilai Standar lainnya Nilai Pengelolaan Keuangan Distransnaker Predikat SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100 Persen B Predikat 100 Persen	3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	3.32.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.32.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan	100 Persen		3.32.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.32.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		3.32.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7546400 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan 0 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.32.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		3.32.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	Kab. Mamuju	
			3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		3.32.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Dokumen	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Mamuju	
			3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100 Persen		3.32.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
			3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		3.32.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yg terpelihara	100 Persen		3.32.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
							3.32.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.32.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju	
	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya perencanaan kawasan transmigrasi	60 Persen	3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	100 Hektar	3.32.02.2.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		
							3.32.02.2.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1000 Hektar		
							3.32.02.2.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen		
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi	60 Persen	3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Transmigrasi Yang Difasilitasi Penempatan, pelatihan dan penyesuaian lingkungan di Kawasan Transmigrasi	1 UPT	3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		
							3.32.03.2.01.02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen		
							3.32.03.2.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	100 KK		
							3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	50 KK		
							3.32.03.2.01.06 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	250 KK		
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	70 Persen	3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah warga transmigrasi dan Satuan Permukiman Yang Dikembangkan	70 Persen	3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	250 KK		
							3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 SP		
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana	100 persen	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
		persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, persn staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100 persen				4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan daerah	100 Persen	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
					Jumlah Orang Dan Dokumen Administrasi Keuangan	100 persen	4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Barang milik daerah	100 Persen	4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
					Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Kab. Mamuju	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah	100 Persen	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penunjang Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	21 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Mamuju	
							4.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		
							4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Mamuju	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket		
							4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Jasa sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		
							4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket		
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana	100 Persen	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen		
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan		
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen		
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan	100 Persen		4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan		
							4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	100 Persen	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		
		Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	100 Persen								
		Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritua, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100 Persen								
		Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	100 Persen								
		Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100 Persen								
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan di Bidang Bina Mental Spiritual, Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana	100 Persen	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen		
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen		
							4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen		
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 Persen	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	40 Dokumen		
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus		
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200 Dokumen		
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti dengan Naskah Kerjasama	100 Persen	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60 Dokumen		
							4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen		
							4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan		
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	100 Persen	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 Persen	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen		
		Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100 Persen								
		Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	100 Persen								
		Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	100 Persen								
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan		
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Nilai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan terhadap Belanja APBN dan APBD	100 Persen	4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik, Tersedianya Sarana Elektronik untuk e-procurement, Tersedianya SDM dalam pengelolaan PBJ	100 Persen		4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen		
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen		
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang		
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana	100 Persen		4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		
							4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen		
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		
4.02 SEKRETARIAT DPRD											
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan	100 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase laporan Perencanaan penganggaran evaluasi dan kinerja perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	
			4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100 %		4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kab. Mamuju	
			4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %		4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan keuangan dan Kesejahteraan	100 %		4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kab. Mamuju	
							4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Mamuju	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100 %	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Mamuju		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju		
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju		
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan keuangan dan Kesejahteraan	100 %	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju		
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan administrasi	100 %	4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Kab. Mamuju		
						4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	Kab. Mamuju		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase Perda yang ditetapkan	100 %	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
						4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
						4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perundang-Undangan	30 Dokumen	Kab. Mamuju		
						4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase laporan yang disusun	100 %	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	7 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	7 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	7 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	7 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan yang disusun	100 %	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase jenis Bimtek Terlaksana	100 %	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	60 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat	100 %	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	214 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Kab. Mamuju	
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	persentase laporan kode etik DPRD yang diselesaikan	100 %	4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	124 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	7 Dokumen	Kab. Mamuju	
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	Kab. Mamuju	
5.01 PERENCANAAN											
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Mamuju	
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen		5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Administrasi Kepegawaian	36 Orang	Kab. Mamuju	
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen		5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kab. Mamuju	
							5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Mamuju	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	100 Persen	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	100 Persen	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen		
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		
							5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan		
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	1 Dokumen		
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi	100 Persen		5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program 100 Persen perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai Persentase indikator program 100 Persen perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai Persentase indikator program 100 Persen perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahandan Pembangunan Manusia yang telah mengikuti koordinasi, asistensi dan monev dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			
						5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan			
						5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan			
						5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			
						5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan			
						5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan			
						5.01.03.2.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah mengikuti koordinasi, asistensi dan monev dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			
						5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan			
						5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan			
						5.01.03.2.03 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			
						5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan			
						5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan			
						5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			
	5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan								
	5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan								
5.02 KEUANGAN											
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM dan Nilai Standar lainnya 100 Persen Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen Nilai Pengelolaan Keuangan Bapenda 100 Persen Predikat SAKIP Badan B Predikat Pendapatan Daerah	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
						5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
						5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
						5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan 4 Laporan	Kab. Mamuju	
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan 100 Persen Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen			5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 Jenis 56 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan 12 Laporan	Kab. Mamuju	
			5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 Persen Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen			5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan 1 Laporan	Kab. Mamuju	
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen			5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket 60 Paket	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen 56 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang 5 Orang	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Mamuju	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen			5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket 1 Paket	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket 3 Dokumen	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan 150 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan 2 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen		5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit 1 Unit	Kab. Mamuju	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen		5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 3 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen 100 Persen		5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit 26 Unit	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit 16 unit	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit		
							5.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	Kab. Mamuju	
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Kab. Mamuju	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Rancangan Kegiatan Anggaran sesuai dengan ketentuan	100 Persen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	Kab. Mamuju	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Akuntansi sesuai Ketentuan Jumlah unit kerja yang menyampaikan Dokumen Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan	100 Persen 100 Persen	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	Kab. Mamuju	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tersalurkannya Belanja Transfer, BTT, dan Dana Bagi Hasil	100 Persen	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Mamuju	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	69 Orang	Kab. Mamuju	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi Pad Terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	0 Persen	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 Persen	5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen		
		Persentase Pad Terhadap Pendapatan	7,4 Persen				5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen		
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan		
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit		
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 unit		
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11 Laporan		
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	18 Laporan	120000 Objek pajak	
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	18 Laporan	2 Dokumen	
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	252 Layanan		
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen		
							5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen		
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Laporan		
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan		
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP BKPP	B Sekor	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
			5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju		
			5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	Kab. Mamuju		
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju		
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mamuju		
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Mamuju		
						5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Mamuju		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesional ASN	50 Persen	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
						5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Kab. Mamuju		
						5.03.02.2.01.05 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.2.01.08 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Mutasi dan Promosi ASN	100 Persen		5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen		5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	4 Orang	Kab. Mamuju	
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Persen		5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	55 Orang	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	11.0 Persen	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Cakupan Pengembangan Kompetensi Teknis	100 Persen	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	36 Orang	Kab. Mamuju	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen	5.04.02.2.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan Persentase hasil penelitian yang dikembangkan menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil inovasi yang diterapkan menjadi kebijakan	100 Persen	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH											
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi CAPAIAN INDIKATOR RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja.	4 Laporan	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Laporan	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
			6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Mamuju	
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	9 Orang		6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Mamuju	
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71 Laporan	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	Kab. Mamuju	
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit		6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Mamuju	
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan		6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	23 Unit		6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Mamuju	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Mamuju	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.Persentase Obyek Pengawasan yang diawasi 2. Persentase Rekomendasi Temua Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.Persentase Obyek Pengawasan yang diawasi 2.Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti	135 Laporan	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan		
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan		
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan		
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Laporan		
							6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25 Laporan		
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	82 Kesepakatan		
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diawasi	23 Kasus		6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7 Kasus		
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 Kasus		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, 2.Persentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKS	100 Persen	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	1.Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas 2.Jumlah PMPRB OPD/Desa yang dievaluasi 3.Jumlah Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKS	100 Persen	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	88 Perangkat Daerah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah		
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan		
							6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah		
7.01 KECAMATAN											
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	100 Persen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
		Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen		
		Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1000 persen		Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD	100 Persen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		
		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Persentase keselarasan Perencanaan Capaian Kinerja PD	100 Persen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
		persentase Capaian urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen		
		Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan		Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen		
		Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		terlaksananya penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		Tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Urusan		Tersedianya Dokumen Renja	1 dokumen		
		persentase penunjang urusanpemerintah daerah kabupaten/kota	100 persen		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen					
		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan		Tersedianya Dokumen Perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen					
							7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen		
							7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
								jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusunnya	1 dokumen		
								Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen		
							7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
								jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen		
								Tersedianya Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen		
							7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
								jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
								Tersedianya Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen		
								Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		Kab. Mamuju	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			
							Jumlah laporan LAKIP,LPPD,LKPJ dan PK yang tersusun	4 dokumen			
						7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		Kab. Mamuju	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			
							Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ, 4 Dokumen LAKIP, dan Perjanjian Kinerja yang disusun				
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan adm. Keuangan	100 Persen	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	14 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan			
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100 persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan			
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan			
				Tersedianya Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan			
				Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	1 dokumen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan			
				Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	2 Laporan		Jumlah Oran yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	17 orang			
							Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	24 Orang			
						7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		Kab. Mamuju	
						7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Kab. Mamuju	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			
							Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	12 Dokumen			
						7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen		Kab. Mamuju	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	4 dokumen 2 semesteran 4 Dokumen 4 Laporan 12 Laporan 18 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	Kab. Mamuju	
			7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan Adm. BMD Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Tersedianya Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan barang milik daerah Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen 100 Persen 100 persen 100 persen 100 Persen 3 dokumen daerah 4 dokumen 100 Persen		7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Jenis 3 Laporan 2 jenis	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen	Kab. Mamuju	
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen /Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Kualitas dan kuantitas serta manajemen pengelolaan Aparatur OPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya manajemen pengelolaan Aparatur OPD Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	25 Orang 2 Jenis 23 pasang 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 1 kegiatan 12 Bulan		7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	29 Pasang 23 paket 0 Paket 15 Paket 16 Paket 18 Pasang 22 Paket 23 Paket 26 Paket 150 pasang 24 Orang	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen 16 Dokumen 18 Dokumen 84 orang 50 orang	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen 1 kegiatan 16 Dokumen	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen 1 kegiatan 16 Dokumen	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang 1 Orang 0 Orang 1 kegiatan 1 Orang 21 Orang	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ikut Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	0 Orang 1 Orang 10 Orang/bulan 2 orang	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 100 Persen Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan Persentase Administrasi umum perangkat daerah 100 Persen Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah 100 Persen Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum 100 persen Terlaksananya Administrasi umum perangkat Daerah 100 Persen Tersedianya Admistrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen Tersedianya Sarana dan Prasarana perkantoran demi kelancaran perangkat daerah 12 Bulan Tersusunnya Dokumen Pelayanan Umum 8 dokumen		7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Komponen Listrik yang tersedia 5 jenis Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia 6 Jenis Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Jenis Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 bulan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 Paket Tersedianya jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor 5 Jenis		Kab. Mamuju		
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 31 jenis Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 jenis Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Jenis Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 32 Jenis Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia 46 Jenis Terlaksananya pengadaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan 12 bulan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 Jenis		Kab. Mamuju		
						7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 jenis Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Jenis Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6 jenis Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Jenis Terlaksananya Pengadaan Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dibutuhkan 12 bulan Tersedianya Peralatan rumah tangga 9 Jenis		Kab. Mamuju		
						7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia 65 Jenis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Bulan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 950 kotak yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17 jenis Tersedianya Bahan Logistik Kantor 6 Jenis Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan 12 bulan		Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibutuhkan	2 Jenis 7 jenis 0 Paket 2 jenis 2 Paket 3 Paket 4 Jenis 4 Paket 9 dokumen 3 Jenis 12 bulan	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dibutuhkan	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Jenis 12 bulan	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Jenis 4 Paket	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi Jumlah Kunjungan Tamu yang mendapatkan fasilitasi layanan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Terwujudnya Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Jenis 11 Bulan 11 kali 0 Laporan 4 Laporan 11 Laporan 110 kotak 32 Orang 12 bulan	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunnya laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	55 Laporan 0 Laporan 10 Laporan 47 Laporan 93 Laporan 120 Laporan 122 Laporan 125 Laporan 321 kali 12 bulan 150 Kali 2 Laporan	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen arsip yang dikelola Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 jenis 0 Dokumen 12 bulan	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah persentase ketercukupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketercukupan Sarana dan Sarana Aparatur Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan BMD sesuai yang dibutuhkan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 15 unit 4 Unit 100 Persen	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibutuhkan	3 unit 0 Unit 1 unit 1 Unit 2 Unit	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Lapangan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	1 unit 1 Unit 1 Unit	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan Tersedianya Mebel yang diadakan Tersedianya Mebel yang Dibutuhkan	0 Unit 2 Jenis 2 Unit 3 unit 4 Unit 5 Unit 8 Paket 3 jenis 7 Unit 3 jenis	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibutuhkan	3 unit 0 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 12 Unit 8 Unit 3 jenis	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 jenis 1 Unit 1 zet 3 Unit	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Jenis 2 Unit	Kab. Mamuju	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana perkantoran demi kelancaran perangkat daerah Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	100 Persen 8 Orang 12 Bulan 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 persen 12 Bulan 12 Bulan 1000 Persen	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Persuratan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyedia pelayanan jasa surat menyurat	0 Jenis 12 Laporan 2 jenis	Kab. Mamuju	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan	2 Jenis 2 jenis 3 Laporan 0 Laporan 3 Kegiatan 4 Laporan 12 bulan 12 Laporan 4 Jenis 12 bulan	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	2 Jenis 0 Laporan 1 Laporan 1 Unit 12 bulan	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	3 jenis 0 Orang 0 Laporan 3 Kegiatan 4 Laporan 10 Laporan 12 bulan 12 Laporan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Desa Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Unit 100 Persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 persen 12 Bulan 12 Unit 12 Bulan 100 Persen		7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan 4 yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 unit 0 Unit 8 Unit 9 unit 10 Unit 12 Unit 15 Unit 1 Tahun 6 Unit	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	0 Unit 2 Jenis 4 Unit 8 Unit	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Jenis	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pemeliharaan peralatan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Peralatan dan Mesin Terpelihara	4 unit 2 Jenis 5 unit 0 Unit 3 Jenis 4 Unit 1 Tahun 13 Unit	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Paket		
							7.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0 Unit 1 jenis	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor terpelihara Jumlah pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit 0 Unit 1 Jenis 1 Unit 4 unit 1 Unit 1 Tahun	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	12 Bulan 2 Paket 3 Jenis	Kab. Mamuju	
							7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	Kab. Mamuju	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 PERSEN 100 % 100 Persen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang dikordinasikan dan tepat waktu Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kooredinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Pesentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintah di Kecamatan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja OPD Tersediny Kegiatan Pelayanan Publik Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 1 kegiatan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 1 Tahun	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/ sinergi Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan instansi terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Musyawarah Pembangunan di tingkat Kecamatan	1 kegiatan 0 Laporan 1 Laporan 1 dokumen/laporan 2 Laporan 1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja OPD Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 persen 100 Persen 100 Persen 12 Bulan	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan 1 Laporan 0 Laporan 1 Tahun 6 Laporan			
							7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan 0 Laporan 9 Desa 12 bulan 12 Laporan 3	Kab. Mamuju		
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Tingkat Kecamatan	100 persen	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14 dokumen			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Tersedianya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terwujudnya pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Kegiatan 60 Laporan 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 Persen 14 dokumen 100 Persen 12 Bulan	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen/ laporan Perizinan Non Usaha yang diterbitkan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha Jumlah Urusan Perizinan Non Usaha yang tersedia Tersedianya Dokumen Perizinan Non Usaha yang diterbitkan	10 laporan 0 Dokumen 1 Dokumen 6 Laporan 4 jenis 10 Laporan	Kab. Mamuju		
							7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Urusan Non Perizinan yang tersedia Tersedianya Dokumen Nonperizinan yang dilaporkan	0 Laporan 1 Laporan 10 Laporan 12 Laporan 15 Dokumeb 4 jenis 10 Laporan	Kab. Mamuju		
							7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan 5 Laporan	Kab. Mamuju		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan di desa	100 Persen	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Laporan	Kab. Mamuju	
		Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen		Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 PERSEN					Jumlah Usulan Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Dokumen		
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 PERSEN					Terlaksananya Pembangunan	9 Laporan Desa		
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang efektif	2 Kegiatan	Kab. Mamuju	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	erlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Laporan	Kab. Mamuju	
					Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang ada di Kelurahan	3 Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan		
					Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		
					Terseleenggarannya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen		Jumlah Usulan Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Dokumen		
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Unit	Kab. Mamuju	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Jenis		
								Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	11 kegiatan		
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang di Berdayakan di Kelurahan	124 Orang	Kab. Mamuju	
								Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan	12 kegiatan		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas		
							7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		
				7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang ada di Kelurahan	3 Kelurahan	7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Dokumen		
					Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 persen		Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		
					Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 Persen		Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 kegiatan		
					Terlaksananya Kordinasi dan sinkronisasi PPKM	2 Kelurahan		Jumlah laporan kegiatan pencegahan covid-19 di Tingkat Desa	12 Laporan		
								Jumlah Pencegahan covid 19 yang ada di desa /Kelurahan	3 kegiatan		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 Persen	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	100 Persen	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Kegiatan		
		Persentase Program Koordinasi Ketenteraman Umum	100 persen		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		
					Terwujudnya sinergitas dengan kepolisian Negara Reoublik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	1 Tahun		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinergi terkait Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan dan peraturan kepala daerah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Terlaksananya Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Terlaksananya Penerapan dan Pengakan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan 3 Laporan 3 laporanl 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 Persen 1 Kegiatan 12 Bulan 100 Persen	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan sinergi terkait Peraturan Perundang-undangan Jumlah Laporan dalam Pelaksanaan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 kegiatan 14 Dokumen 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 6 Laporan 1 laporan	Kab. Mamuju		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Tingkat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 PERSEN 100 Persen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah Jumlah Pembinaan Kerukuna Antar Suku, Umat Beragama yang dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terwujudnya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersediaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan 1 Kegiatan 100 persen 100 Persen 100 Persen 1 kegiatan 100 Persen 100 Persen 12 Bulan 100 Prsen	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan 15 Orang		
						7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan 15 Orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Capaian Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 laporan		Kab. Mamuju	
								Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar suku,umat beragama, ras, dan golongan	1 Kegiatan			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Laporan			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang			
								Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar suku umat beragama dan Ras yang terlaksana	1 kegiatan			
								Terlaksananya Pembinaan Kerukunan dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal dan Nasinal	1 Laporan			
							7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan			
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan			
							7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen		Kab. Mamuju	
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 kegiatan			
								Jumlah Laporan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	2 Laporan			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 PERSEN	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordnasi Pelaksanaan Pembangun Kawasan Pedesaan diwilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pmerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tersedianya Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa Tersedinaya Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Kegiatan 7 laporan 9 Laporan 100 Persen 9 Laporan 100 Persen 100 Persen 7 Desa 100 Persen 9 Desa 1000 Persen	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	0 Dokumen 1 kegiatan 9 Dokumen 1 Kegiatan		Kab. Mamuju	
							7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kegiatan			
							7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Laporan Palaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen 6 Dokumen 7 Dokumen 9 Desa 1 Kegiatan 10 Dokumen		Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	0 Laporan 1 Laporan		
							7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 kegiatan		
							7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kegiatan		
							7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 kegiatan		
							7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah laporan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan di desa	0 Dokumen 1 kegiatan 13 Laporan		
							7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 1 Kegiatan		
							7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 kegiatan		
							7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Tersedianya Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	10 kegiatan 4 Laporan 7 Laporan 7 laporan 9 Laporan	Kab. Mamuju	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	11 Dokumen	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Mamuju	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Gaji dan Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan	100 Persen	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Mamuju	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen	8.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Mamuju	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Mamuju	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	Kab. Mamuju	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Mamuju	
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Mamuju	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kab. Mamuju	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	100 Persen	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen/ Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Dokumen	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	Kab. Mamuju	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	100 Persen	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen/Laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22 Dokumen	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	Kab. Mamuju	
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	Kab. Mamuju	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terbina	100 Persen	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen /Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21 Dokumen	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21 Laporan	Kab. Mamuju	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	100 Persen	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen/ laporan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	2 Dokumen	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	Kab. Mamuju	
							8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	Kab. Mamuju	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	100 Persen	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen/ Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	11 Dokumen	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	Kab. Mamuju	
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan	Kab. Mamuju	
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Mamuju	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran yang efektif dan efisien serta berorientasi pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, sedangkan Urusan Wajin non Pelayanan Dasar merupakan urusan yang wajib diselenggarakan tetapi bukan merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Prioritas belanja daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	348.523.793.070	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	348.523.793.070	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	348.523.793.070	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	280.960.772.014	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.338.531	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.336.924	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.138.815	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.600.064	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.138.814	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.138.814	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.799.097	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.186.003	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	276.798.104.180	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	276.669.796.881	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.799.097	
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.993.754	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.993.754	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.260.347	
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.260.347	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.214.617	
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.336.924	
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	23.138.815	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.600.064	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.138.814	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.371.183	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.448.334	
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.067.050	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.566.736	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	237.351.563	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.968.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.968.750	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.869.294	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.072.828	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.736.838	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.063.792	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.522.200	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.121.400	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.385.375	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.411.627	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.812.500	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.742.734	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.783.500.000	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	922.500.000	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	46.125.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.125.000	
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	768.750.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.214.909	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.584.096	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.062.500	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.568.313	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.159.300	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	804.419.924	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.869.688	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.869.688	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	67.124.374.182	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.509.679.804	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	201.234.048	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	201.234.046	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.417.950	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	148.115.454	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	201.234.047	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	286.905.515	
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	148.917.950	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.128.340.025	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	153.618.628	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	148.115.454	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	314.443.260	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	291.674.793	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	153.618.628	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	947.405.150	
1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	23.062.500	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.100.044.039	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	322.963.411	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	523.145.911	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	190.738.411	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	147.732.617	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	101.607.617	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	101.607.617	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	159.988.411	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	144.613.411	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	138.463.411	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.882.062.500	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.125.000	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	46.125.000	
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	46.125.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.874.631.449	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	256.530.989	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	186.319.285	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	148.074.289	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	166.057.114	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	256.530.987	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	186.319.285	
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	143.326.431	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	148.074.289	
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	143.326.431	
1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	143.326.431	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	157.050.954	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	429.744.289	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	900.766.020	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	233.704.742	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	166.057.114	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	164.280.987	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	187.228.927	
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	143.326.431	
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	148.074.289	
1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	128.566.431	
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	128.566.431	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	207.210.954	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	516.972.617	
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	23.062.500	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	137.463.724	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	279.801.733	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	174.052.483	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	150.318.501	
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	385.302.169	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	273.318.501	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	128.238.724	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82.113.724	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	82.113.724	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	146.992.483	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	131.617.483	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	125.467.483	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.326.957.500	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	46.125.000	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	46.125.000	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	46.125.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.766.329.983	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	115.079.147	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	174.749.636	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	165.403.523	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	160.449.554	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	157.904.442	
1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	11.531.250	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	140.283.704	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	158.249.119	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	134.133.704	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	149.582.531	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	124.908.704	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	141.238.057	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	140.283.704	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	124.908.704	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	109.533.704	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.711.965.500	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	46.125.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.973.732.946	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	121.054.440	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	121.054.440	
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	97.991.940	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	121.054.440	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	91.991.432	
1.01.02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	7.687.500	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	110.876.822	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	76.875.000	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	104.726.822	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	120.101.822	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.976.822	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120.101.822	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120.101.822	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	73.976.822	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.519.911.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.750.000	
1.01.02.2.04.19	Pembangunan Laboratorium	15.375.000	
1.01.02.2.04.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	23.062.500	
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	23.062.500	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	16.308.483	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.872.322	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.436.161	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.436.161	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.436.161	
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.436.161	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	381.979.016	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	381.979.016	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	381.979.016	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	40.359.375	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.296.875	
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.296.875	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	23.062.500	
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	11.531.250	
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	11.531.250	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	217.503.369.091	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	167.884.078.659	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	167.884.078.659	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.462.288.573	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.065.080	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.768.520	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.766.360	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.766.360	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.051.760	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.051.760	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	360.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.300.320	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.338.380.919	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.241.876.919	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.440.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.344.000	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	360.000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.240.000	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.240.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.434.200	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	360.000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	360.000	
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	360.000	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	47.634.200	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	360.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.048.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.450.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	360.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.564.800	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.195.200	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.460.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.568.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.780.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.560.000	
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.110.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.534.000	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.696.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.680.000	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.579.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.579.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.743.374	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	501.683.374	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	360.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.843.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.600.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	360.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.243.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.920.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.000	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120.106.731.188	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.910.169.256	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	2.993.980.000	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.618.880.000	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	995.720.000	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	2.993.980.000	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	995.720.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	497.860.000	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	995.720.000	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	120.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	91.080.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.547.172.976	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	6.325.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.094.749.580	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.236.450.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	248.160.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	248.160.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.689.000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.522.700	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.092.961.932	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.348.579.892	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	289.986.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.600.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	501.152.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.240.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.280.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	391.020.046	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24.427.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.070.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	31.100.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	69.312.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	23.360.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.600.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	185.118.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	132.408.800	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	408.008.800	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	135.322.800	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	90.556.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	49.600.000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	30.000.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	34.523.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	107.700.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	286.920.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	73.650.855.132	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	12.600.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	20.800.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.360.000	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	17.481.419.662	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	867.042.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	36.800.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100.000.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	126.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	103.600.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10.010.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	42.000.000	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	51.590.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.726.095.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	59.370.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	29.685.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	29.685.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.637.685.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.608.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.685.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.040.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.040.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	259.209.698	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.370.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	29.685.000	
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	29.685.000	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	59.010.000	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	29.685.000	
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	29.325.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	31.996.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	31.996.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	29.685.000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	29.685.000	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	29.325.000	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	29.325.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	49.823.698	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	29.685.000	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	20.138.698	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	329.754.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.779.200	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	101.779.200	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.975.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	143.975.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.000.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	84.000.000	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	49.619.290.432	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	49.619.290.432	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.392.238.266	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.054.396	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.276.796	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.225.200	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.188.000	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.188.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.182.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.997.200	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.997.200	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.113.390.466	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.056.407.066	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.553.400	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.758.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	672.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.609.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.018.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.191.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	800.000	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.384.404	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.384.404	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	22.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.227.044.966	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.110.000.000	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.000.000.000	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.500.000.000	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.110.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.544.200	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20.105.300	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.438.900	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	500.766	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	500.766	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.200	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.200	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.200	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93.105.359.441	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93.105.359.441	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93.105.359.441	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.482.382.281	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.635.739	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.255.400	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.633.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.845.600	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.522.000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.390.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.105.139	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.884.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.524.086.431	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.307.742.441	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.880.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.905.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.558.990	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.505.800	
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.547.800	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.958.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.069.400	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.069.400	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.255.911	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.835.511	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.690.400	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.660.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.559.200	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.510.800	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.773.000	
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.936.000	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	840.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.997.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.076.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.072.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.004.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.980.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.300.000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	35.000.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.680.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.979.885.780	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.574.967.270	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	999.970.800	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.574.996.470	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.404.918.510	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.104.919.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	299.999.510	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.973.169.500	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.973.169.500	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.973.170.500	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.999.999.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.320.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.320.000	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	660.000	
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	660.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.012.416.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.012.416.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.175.480.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.836.936.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	925.631.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	925.631.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	924.971.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	660.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.794.807.640	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.794.807.640	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.794.807.640	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	24.230.073.420	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	24.230.073.420	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100.088.200	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	24.129.985.220	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34.355.013.600	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	34.355.013.600	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.000.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	3.281.229.800	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	28.213.794.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	2.199.994.200	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	559.995.600	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	660.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	660.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	660.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	350.000.220	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	151.225.300	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	151.225.300	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	47.005.280	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	47.005.280	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	102.601.400	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	102.601.400	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	49.168.240	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	23.331.640	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	25.836.600	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.663.367.499	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.663.367.499	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.663.367.499	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.420.805.300	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.929.560	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.703.800	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.211.000	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.031.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.087.000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	896.760	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.076.317.124	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.980.446.924	
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.069.000	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.801.200	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.582.400	
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.582.400	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.540.980	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.704.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.740.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.952.680	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.290.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.854.300	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.377.776	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.910.576	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	467.200	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.057.460	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.870.650	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.986.810	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.200.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	66.934.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	41.440.600	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.781.800	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	20.658.800	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.853.400	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	6.853.400	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	18.640.000	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	18.640.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	318.649.449	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	19.356.000	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	19.356.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	23.684.960	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	23.684.960	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	275.608.489	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	24.167.360	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	251.441.129	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	263.066.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	263.066.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	263.066.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	583.231.230	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	583.231.230	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8.338.200	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	348.307.800	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	11.400.920	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	29.203.920	
1.04.05.2.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	185.980.390	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.681.520	
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	10.681.520	
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	10.681.520	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.681.946.986	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.037.132.208	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.037.132.208	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.730.892.568	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.437.600	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.126.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.791.200	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.222.400	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.298.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.289.617.608	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.167.508.208	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.382.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.727.400	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.299.110	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.472.790	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.758.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.530.320	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.120.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.418.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.926.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.926.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.612.250	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.612.250	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.260.789.640	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.231.463.840	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	55.704.800	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	44.471.640	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40.500.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.960.786.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	70.000.000	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.001.400	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.325.800	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	11.800.800	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	17.525.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	45.450.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemdaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.450.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	45.450.000	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.644.814.778	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.644.814.778	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.056.204.168	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.643.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.882.200	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.275.400	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.151.200	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.166.800	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.890.400	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.706.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.571.400	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.748.996.368	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.699.381.568	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.840.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.774.800	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.173.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.997.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.516.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.160.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.556.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.556.000	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.949.200	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.633.200	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.316.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.886.200	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.986.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.200	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	588.610.610	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	477.300.000	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	500.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.000.000	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	58.000.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	254.800.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	108.000.000	
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	1.000.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60.310.610	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	310.610	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	21.000.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	38.000.000	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	26.000.000	
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.000.000	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	25.000.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.399.135.237	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	3.399.135.237	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	3.399.135.237	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.438.535.917	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.699.200	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.283.200	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.783.200	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.283.200	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.283.200	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.283.200	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.783.200	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.120.900.865	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.060.772.533	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.034.800	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.381.532	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.712.000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.032.000	
1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.032.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.497.000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.970.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.600.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.108.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.440.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.915.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.464.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.096.000	
1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.456.000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.640.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.988.852	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.174.852	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.814.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.322.000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.710.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.712.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.900.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	159.999.720	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	159.999.720	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.063.800	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	91.512.120	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	34.423.800	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	99.999.800	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	41.757.960	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	41.757.960	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	58.241.840	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	28.435.200	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	29.806.640	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	231.490.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	231.490.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46.615.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	184.875.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	459.109.800	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	66.606.560	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	66.606.560	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	392.503.240	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	392.503.240	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	10.000.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.000.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	272.385.780	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	272.385.780	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	272.385.780	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.029.764	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5.029.764	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	5.029.764	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	15.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	15.000.000	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	44.970.236	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	29.970.236	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4.970.236	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	25.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	207.385.780	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.753.180	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	4.000.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	34.753.180	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	168.632.600	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.078.600	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	142.554.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.553.299.675	
2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.553.299.675	
2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.553.299.675	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.238.399.675	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.419.000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.556.000	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.556.000	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.101.000	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.930.000	
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.028.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.248.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.340.806	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.928.280.806	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.740.000	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.120.000	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.521.000	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.000	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.600.000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.586.100	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.400.000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.440.000	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.550.000	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.994.900	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.000.000	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.018.869	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.018.869	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.100.000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.300.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.800.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	414.000.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	32.000.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	32.000.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	382.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	350.000.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	290.000.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	32.970.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.970.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	32.970.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	270.960.000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	223.000.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	175.000.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48.000.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.960.000	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.960.000	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	306.970.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.970.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	32.970.000	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.799.883.377	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.799.883.377	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.799.883.377	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.502.928.487	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.653.070	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.933.200	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.523.200	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.251.670	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.504.000	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.441.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.294.303.335	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.196.281.535	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.420.800	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.601.000	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.222.000	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.222.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.051.010	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.244.800	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.544.400	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.310.810	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.060.000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.330.000	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.498.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.063.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.000.000	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.543.072	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.343.072	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.156.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.760.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.700.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.696.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.000.000.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	3.000.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	249.728.120	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	72.734.840	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	27.624.400	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	23.661.040	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	21.449.400	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	128.544.480	
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	15.269.480	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	106.227.400	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7.047.600	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	48.448.800	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	31.449.600	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16.999.200	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19.907.850	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	12.441.970	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	12.441.970	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.465.880	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	7.465.880	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.318.920	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27.318.920	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.318.920	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.990.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	468.990.000	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	468.990.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	198.990.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	198.990.000	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	198.990.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	20.000.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	250.000.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.742.140.884	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	12.742.140.884	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	12.742.140.884	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.271.442.804	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.008.400	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.319.600	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.999.200	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.999.200	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.841.200	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.841.200	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.008.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.610.586.184	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.481.656.884	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.540.000	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.482.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	65.907.100	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.326.400	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.326.400	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.538.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.538.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.114.800	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.295.000	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.273.800	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.990.400	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.492.600	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.625.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.438.000	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.881.000	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.281.000	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.600.000	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.584.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.584.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.404.020	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.500.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.904.020	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	152.815.600	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	152.815.600	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	124.575.200	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	28.240.400	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	343.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	343.200.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	343.200.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	30.447.800	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	30.447.800	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.447.800	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	59.299.200	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.299.200	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	29.294.200	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.005.000	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	15.671.680	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	15.671.680	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	15.671.680	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	24.760.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.760.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	24.760.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.160.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.160.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4.160.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.840.343.800	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.840.343.800	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	47.495.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4.053.600.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.702.248.800	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	7.000.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.041.149.434	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.041.149.434	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.041.149.434	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.359.482.698	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.473.220	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.509.520	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.766.400	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.448.600	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.216.000	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.923.100	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.947.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.662.600	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.993.325.125	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.935.903.434	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.449.000	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.611.891	
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.675.000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.685.800	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.237.379	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.237.379	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.779.880	
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.199.880	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.580.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.626.619	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.454.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.801.579	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.977.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.040	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.074.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.941.160	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.941.160	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.830.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.830.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.269.315	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.904.350	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.995.565	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.369.400	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	302.215.926	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	258.835.926	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	18.767.746	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	119.481.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	44.921.560	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	18.263.766	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	57.401.854	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	25.000.000	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25.000.000	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	18.380.000	
2.12.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.380.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	142.079.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	117.079.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	58.539.500	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	58.539.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	25.000.000	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	25.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	214.908.930	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	104.097.290	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	51.968.560	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	52.128.730	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.811.640	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.811.400	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.240	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.000.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	22.462.880	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	22.462.880	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	22.462.880	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.839.302.468	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.839.302.468	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.839.302.468	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.539.302.468	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.269.900	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.600.000	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.872.800	
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.130.800	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.035.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.008.200	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.142.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.480.300	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.200.190.668	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.346.468	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.177.400	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.666.800	
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.000.000	
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.220.900	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.023.700	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.440.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.606.200	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.710.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.081.000	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.156.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.956.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.465.000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.465.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	30.000.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	30.000.000	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	30.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	220.000.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	220.000.000	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	25.000.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	40.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20.000.000	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	35.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	50.000.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.046.684.894	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.046.684.894	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.046.684.894	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.135.025.094	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.402.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.942.000	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.584.000	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.584.000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.264.000	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.198.000	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.830.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.801.664.294	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.714.300.294	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.280.000	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.619.000	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.465.000	
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.419.000	
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.419.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.987.780	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.084.100	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.201.680	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.882.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.004.100	
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.004.100	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.781.920	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.181.920	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.766.000	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.766.000	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	196.243.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	22.184.000	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	22.184.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	174.059.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	6.765.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	108.000.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	59.294.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.235.402.900	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	878.489.200	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	46.249.200	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	145.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	171.600.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	405.000.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	484.400.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	484.400.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.355.013.700	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.300.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	282.909.900	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.004.000.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.200.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	39.603.800	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	517.500.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	517.500.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.480.013.900	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.480.013.900	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	28.763.500	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16.667.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	26.043.400	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.408.540.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.566.559.688	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	5.566.559.688	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	5.566.559.688	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.888.600.688	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.242.804.088	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.132.964.088	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.840.000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.000.000	
2.15.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.000.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.643.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.150.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.786.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.347.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.000.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.355.600	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.595.600	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329.760.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.798.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.060.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.238.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	562.959.000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	120.000.000	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	120.000.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	250.000.000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	20.000.000	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	20.000.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	16.336.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	16.336.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	115.664.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	13.500.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	102.164.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.199.000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7.199.000	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.760.000	
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	13.760.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	115.000.000	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	115.000.000	
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	115.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.491.084.087	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.491.084.087	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.491.084.087	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.098.805.167	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.671.808.975	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.575.928.975	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.880.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.158.404	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.045.084	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.443.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.320	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.270.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.800.000	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.000.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.273.788	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.213.288	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.060.500	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.264.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.200.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.064.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	324.653.320	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	324.653.320	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.050.000	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	30.000.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	30.000.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100.598.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	15.360.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	100.000.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	5.000.320	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	38.645.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	67.625.600	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.625.600	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	10.000.000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	20.000.600	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	14.625.000	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	6.000.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.694.328.597	
2.17.3.31.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	3.694.328.597	
2.17.3.31.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	3.694.328.597	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.758.140.302	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.828.900	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.648.000	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.284.400	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.823.600	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.595.300	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.083.600	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.394.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.429.131.397	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.610.597	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.400	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.844.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.546.400	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.662.400	
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.662.400	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.915.600	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.421.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.012.000	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.208.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.223.600	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.728.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.323.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.500.000	
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.500.000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.302.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.302.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.800.005	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.400.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.400.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.005	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	27.656.320	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27.656.320	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.656.320	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10.032.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.032.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.032.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	21.433.400	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.433.400	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	21.433.400	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25.900.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.900.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.900.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	72.265.200	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	72.265.200	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	27.319.200	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	14.982.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	14.982.000	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	14.982.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	778.901.375	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	778.901.375	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	778.901.375	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.083.738.335	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.083.738.335	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.083.738.335	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.472.464.335	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.469.280	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	731.560	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.085.000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.034.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.166.400	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.332.400	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	532.280	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.587.640	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.974.237.575	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.919.051.007	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.580.000	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.606.568	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.348.000	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.348.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.288.000	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.288.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.829.480	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.287.600	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.249.880	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.292.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.182.000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.182.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.360.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.560.000	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.800.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.750.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.800.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.950.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.000.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	35.000.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	15.000.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	15.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	71.460.040	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	71.460.040	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.613.040	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	35.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15.000.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.847.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	421.933.960	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	421.933.960	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	28.539.960	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	276.880.120	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	116.513.880	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.880.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.880.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	47.880.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.803.301.811	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.803.301.811	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.803.301.811	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	685.164.999	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	523.062.500	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	23.062.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500.000.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.102.499	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	126.125.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	35.977.499	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.011.972.812	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.125.000	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	23.062.500	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	23.062.500	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.187.500	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	34.593.750	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	34.593.750	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	69.187.500	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	34.593.750	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	34.593.750	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	758.285.312	
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	23.062.500	
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	735.222.812	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	69.187.500	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	34.593.750	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	34.593.750	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	106.164.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	106.164.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	106.164.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	52.058.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	52.058.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	52.058.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	52.058.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.075.000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.384.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.000.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.691.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4.983.000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.983.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	587.949.790	
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	587.949.790	
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	587.949.790	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	87.500.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50.000.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	37.500.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	250.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	250.000.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	200.000.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	21.453.040	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21.453.040	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	21.453.040	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	28.996.750	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	28.996.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	24.000.000	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	4.996.750	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.179.438.714	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.179.438.714	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.179.438.714	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.880.537.768	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.363.640	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.799.720	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.298.920	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.991.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.766.000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.728.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.780.000	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.662.837.728	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.611.403.728	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.600.000	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.834.000	
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.463.200	
2.23.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.463.200	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.538.000	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.294.600	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	540.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.903.600	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.060.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.767.000	
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.772.800	
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.200.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.351.200	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	2.851.200	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.500.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.184.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.184.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.800.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	298.900.946	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.928.906	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.600.400	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	19.328.506	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.972.040	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	240.178.040	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.794.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.376.150	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.376.150	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.376.150	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	9.376.150	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	7.229.550	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1.908.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1.925.550	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3.396.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2.146.600	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	2.146.600	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.054.541.507	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.054.541.507	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.054.541.507	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.862.237.783	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.404.400	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.207.800	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.930.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.610.000	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.154.000	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.676.000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.826.200	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.509.893.507	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.362.508.507	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.202.000	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.183.000	
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.522.000	
3.25.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.522.000	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.108.000	
3.25.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.108.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.004.683	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.357.000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.503.400	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.574.200	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.450.000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.320.643	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.760.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.039.440	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.382.000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.382.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.923.193	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.400.000	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.012.195	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.510.998	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.769.737.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.729.119.300	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	34.325.000	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.349.984.900	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	344.809.400	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.618.200	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	24.492.200	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	16.126.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.793.673.624	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	111.111.800	
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	11.074.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100.037.800	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.682.561.824	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.669.273.824	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.288.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	628.892.600	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100.037.800	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100.037.800	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	528.854.800	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.394.800	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	513.460.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.879.706.613	
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.879.706.613	
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.879.706.613	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.114.711.613	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.157.000	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.295.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.811.000	
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	936.000	
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	657.000	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.958.000	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.861.116.463	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.803.477.063	
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.531.400	
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.108.000	
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.488.000	
3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.488.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.876.140	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.068.800	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.721.440	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
3.26.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.960.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.805.900	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.250.000	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.250.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.258.500	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.258.500	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.565.510	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.952.000	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.617.510	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.996.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	127.495.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	127.495.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	83.745.000	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	43.750.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	637.500.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	637.500.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	87.500.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	50.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.997.181.898	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN	7.038.936.405	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN	7.038.936.405	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.911.634.100	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.017.295	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.243.895	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.631.000	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.821.800	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.833.600	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.776.000	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.364.000	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.347.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.653.445.805	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.574.224.805	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.184.000	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.318.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.719.000	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.218.000	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.218.000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.951.000	
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.951.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.140.400	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.738.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.166.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.810.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.106.400	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.711.600	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.711.600	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.150.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.150.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	273.989.225	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	273.989.225	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	247.021.225	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	26.968.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.520.841.880	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	24.150.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24.150.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.496.691.880	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.480.375.880	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	16.316.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	11.500.400	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	11.500.400	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	11.500.400	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	14.774.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.774.000	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	14.774.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	306.196.800	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	306.196.800	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	95.496.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10.700.800	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	21.958.245.493	
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	21.958.245.493	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.170.278.685	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.849.000	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.432.000	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.487.000	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.118.000	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	812.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.865.273.469	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.798.263.069	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.432.400	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.004.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.574.000	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.742.000	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.742.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.019.400	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.600	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.925.600	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.718.200	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.762.816	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.562.816	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.200.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.632.000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.632.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.195.018.460	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.488.193.500	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	23.618.500	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.464.575.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	85.098.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	49.098.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	36.000.000	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.621.726.960	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.621.726.960	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.285.788.150	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	29.588.150	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	29.588.150	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.256.200.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.776.200.000	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	30.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	450.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	73.686.960	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	73.686.960	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	73.686.960	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	40.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	40.000.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	11.000.000	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23.600.000	
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.400.000	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	11.933.000	
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	11.933.000	
3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	11.933.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.181.540.238	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.181.540.238	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	34.999.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.146.541.138	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.232.051.680	
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	4.232.051.680	
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	4.232.051.680	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.350.131.680	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.410.034	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.006.034	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.960.000	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.960.000	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.960.000	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.152.000	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.144.000	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.228.000	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.999.930.260	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.760.160	
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.980.000	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.190.100	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.866.000	
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.866.000	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.390.600	
3.30.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.390.600	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.140.000	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	720.000	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.726.000	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	840.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.400.000	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.898.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.556.000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.571.520	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.371.520	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.823.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.960.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.863.266	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	36.183.600	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	18.342.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18.342.000	
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	17.841.600	
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	17.841.600	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	716.920.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	410.624.450	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	410.624.450	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	306.295.550	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	49.295.550	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	257.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	39.935.400	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	29.941.600	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	29.941.600	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.993.800	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.993.800	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	18.816.400	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.816.400	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	18.816.400	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	70.064.600	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	70.064.600	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.064.600	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	283.518.000	
2.17.3.31.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	283.518.000	
2.17.3.31.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	283.518.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	240.994.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	240.994.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	33.068.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	207.926.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.000.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	32.524.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	32.524.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	7.524.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.019.718.243	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.019.718.243	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.019.718.243	
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.869.708.443	
3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.936.124	
3.32.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.311.364	
3.32.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.001.760	
3.32.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.001.760	
3.32.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.840	
3.32.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.621.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.32.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.720	
3.32.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.840	
3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.547.520.439	
3.32.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.493.080.639	
3.32.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.440.000	
3.32.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.999.880	
3.32.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.999.920	
3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.046.080	
3.32.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.546.080	
3.32.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.500.000	
3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.517.800	
3.32.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	996.000	
3.32.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
3.32.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
3.32.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.476.800	
3.32.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.045.000	
3.32.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000	
3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.688.000	
3.32.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.688.000	
3.32.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	
3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	
3.32.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	30.292.400	
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	30.292.400	
3.32.02.2.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.009.800	
3.32.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	15.282.600	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	59.717.400	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.717.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.467.400	
3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	20.250.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	60.000.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	60.000.000	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	25.000.000	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	35.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.833.523.713	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	38.833.523.713	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	38.833.523.713	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.335.544.213	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.838.260	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.087.580	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.379.400	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.699.480	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.565.600	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	26.162.600	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.064.400	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.879.200	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.312.404.863	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.181.523.713	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.028.286.350	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.532.100	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.062.700	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.226.840	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	124.226.840	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.270.753.410	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	86.111.500	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.579.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.068.800	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	171.246.960	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.004.991.800	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.678.666.550	
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.088.400	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.545.200	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	185.786.600	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.758.600	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.181.223.512	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.315.180	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.741.547.992	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	685.534.700	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.825.640	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.191.050	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	621.977.650	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.017.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.146.400	
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.050.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.212.569.078	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	256.239.128	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.806.329.950	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	3.224.731.600	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.824.235.400	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.400.496.200	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	317.105.400	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	121.785.800	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113.947.200	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	47.623.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	16.544.400	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	17.205.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	200.955.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	66.985.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	66.985.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	66.985.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.404.335.800	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	203.036.800	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	16.953.900	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	23.958.900	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	162.124.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.642.000.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.000.000.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.642.000.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	450.000.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	119.279.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	274.475.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	56.246.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	109.299.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	66.074.000	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	29.751.000	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	13.474.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.093.643.700	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	119.000.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	58.000.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	41.000.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	97.190.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	75.700.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	21.490.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	799.947.700	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	69.916.800	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250.005.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	480.025.900	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	77.506.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	14.085.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	30.230.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	33.191.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	33.251.371.384	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	33.251.371.384	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	33.251.371.384	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.222.606.888	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.324.380	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.929.200	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.419.400	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.399.600	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.731.600	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.668.400	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.452.260	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.723.920	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.770.619.545	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.610.559.545	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.891.360	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.268.640	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.950.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.950.000	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.645.260	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	65.700.000	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.945.260	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.783.500	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.000.000	
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.866.500	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.917.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.305.170.600	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.094.400	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.936.200	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.244.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.596.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.968.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	841.544.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.508.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.696.000	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.696.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.731.504	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.868.800	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	512.242.704	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.620.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.538.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.800.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000	
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.400.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.968.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.120.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.475.742.314	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.370.742.314	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	105.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	2.630.355.785	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	743.942.400	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	254.413.385	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.632.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.028.764.496	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.786.784.960	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.884.960	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.779.900.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.934.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.186.800	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.186.800	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	1.186.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	1.186.800	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.186.800	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.117.600	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3.117.600	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.264.080.136	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	651.195.376	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	217.884.760	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	246.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	144.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5.000.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.968.106.800	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	206.840.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.186.800	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	3.760.080.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2.000.741.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.913.291.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	87.450.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	4.405.414.249	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.405.414.249	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.405.414.249	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.642.928.179	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.289.040	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.390.200	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.371.400	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.431.400	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.164.120	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.164.120	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.352.400	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.415.400	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.233.006.750	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.126.016.750	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.651.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.498.800	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.839.400	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.916.400	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.916.400	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.091.800	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.091.800	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.480.689	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.134.400	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.798.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.656.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.122.400	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.469.889	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.300.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.319.200	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.468.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.851.200	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.824.300	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.100.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.724.300	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	290.465.140	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	245.199.940	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	60.513.800	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	25.332.800	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22.012.800	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	38.931.000	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	24.438.540	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	73.971.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.265.200	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.265.200	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	472.020.930	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	229.239.480	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.145.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.483.800	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.553.200	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.409.560	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.922.600	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.725.320	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	119.949.600	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.393.800	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.419.200	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.136.600	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	122.831.850	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.534.850	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.657.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.073.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.898.500	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.747.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.921.500	
5.02	KEUANGAN	165.073.264.821	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.690.807.149	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.690.807.149	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.839.523.159	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.010.400	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.106.200	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.553.600	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.553.600	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	874.000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	874.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.246.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	803.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.330.784.909	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.149.223.309	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.083.350	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.630.700	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.545.350	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.302.200	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.923.200	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.923.200	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.415.150	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	500.000	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.915.150	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.324.900	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.850.000	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.687.600	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.440.400	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.890.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.920.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.536.900	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.814.600	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.252.600	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.400.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.250.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.200.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.650.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	851.283.990	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	851.283.990	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20.627.400	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	45.889.560	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	102.385.600	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	356.966.800	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5.320.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	54.265.670	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8.430.840	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	153.702.480	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	17.101.680	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	53.631.560	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.962.400	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	158.382.457.672	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	158.382.457.672	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.531.125.314	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.669.710	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.848.510	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.166.800	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.346.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.214.000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.029.600	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.064.800	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.070.628.404	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.067.947.284	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	970.222.320	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.808.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.650.000	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.328.000	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.328.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.324.400	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43.324.400	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.920.800	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.200	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.543.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.165.600	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.151.000	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.970.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.663.200	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.663.200	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.880.800	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.000.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.880.800	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.710.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.200.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.510.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	152.542.110.388	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	575.000.000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	180.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	180.000.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	27.167.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	79.450.400	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	58.382.600	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	35.000.000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	213.570.000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45.934.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	23.208.400	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	32.060.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	47.830.200	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	64.314.700	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	66.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	156.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	275.030.000	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	25.454.600	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	46.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24.339.200	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	143.744.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	37.637.000	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	43.809.200	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	151.478.510.388	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	141.478.510.388	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	309.221.970	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	309.221.970	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	78.678.600	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.950.400	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	38.316.050	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	39.130.720	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	25.086.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56.494.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.565.600	
5.03	KEPEGAWAIAN	3.866.400.632	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.866.400.632	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.866.400.632	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.430.828.032	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.759.400	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.228.000	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.171.000	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.171.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.631.000	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.631.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.698.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.229.400	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.123.694.861	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.040.828.181	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.481.280	
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.385.400	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.779.000	
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.220.000	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.559.000	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.660.000	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.220.000	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.220.000	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.220.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.238.600	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.247.800	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.915.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.138.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.920.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.758.800	
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.059.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.150.000	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.150.000	
5.03.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1.000.000	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.189.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.234.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.955.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.357.171	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.100.000	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.250.129	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.507.042	
5.03.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	24.000.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.250.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.250.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	435.572.600	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	82.495.500	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4.000.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	60.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5.098.500	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	5.255.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.000.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	4.142.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	117.569.500	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	13.569.500	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	4.000.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	214.239.000	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	4.000.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	200.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5.624.500	
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	4.614.500	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.268.600	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.374.500	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	4.507.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	4.368.500	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3.018.600	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	4.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.427.400	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.427.400	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.427.400	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.427.400	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	12.000.000	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6.000.000	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6.000.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	12.427.400	
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	6.000.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.427.400	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20.602.500	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20.602.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	20.602.500	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	20.602.500	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.571.370.000	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	10.571.370.000	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	10.571.370.000	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.953.608.000	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.765.950	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.126.950	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.409.000	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.270.000	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.780.000	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.480.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.770.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.930.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.155.545.000	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.071.370.000	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.410.000	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.765.000	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.140.000	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.140.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.415.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.415.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.906.250	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.693.250	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.644.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.000.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.740.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.040.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.300.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.181.000	
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.308.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.535.800	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.535.800	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.000.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.300.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.700.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.600.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.074.697.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	586.937.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95.894.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	122.309.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	78.654.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	137.805.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	130.265.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.010.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	487.760.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.690.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	453.070.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	543.065.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	543.065.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	22.495.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	68.020.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	286.620.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165.930.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	40.328.238.319	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	8.664.224.639	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	8.664.224.639	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.506.085.599	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.381.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.961.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.339.200	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.981.200	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.382.200	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.757.200	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.960.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.826.442.207	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.594.445.287	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	208.795.200	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.496.160	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.705.560	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.643.780	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.650.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.230.780	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.763.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.711.660	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.933.060	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.697.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.167.400	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.354.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.760.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.059.500	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	43.876.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.066.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.117.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.269.052	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.779.352	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.489.700	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.578.400	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.922.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.656.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.628.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.513.800	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.513.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.330.500	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.460.500	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.870.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.784.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.784.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.040.993.240	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.040.993.240	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.648.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.229.171.240	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	787.982.800	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	3.191.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.560.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.299.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.299.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.260.400	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.260.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.379.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.379.500	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.936.500	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.718.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.725.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.578.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.578.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.682.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.318.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.578.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	4.964.357.884	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	4.964.357.884	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.062.202.184	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.172.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.710.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.271.200	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.970.400	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.951.400	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.885.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.821.200	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.562.400	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.339.804.220	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.176.261.620	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.883.200	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.029.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	46.630.400	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.800.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.800.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.873.260	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.895.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.035.270	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.694.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.014.440	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.894.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.520.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.820.550	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.954.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.196.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23.018.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.740.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.983.704	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.719.704	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.264.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.615.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.680.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.900.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.035.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.860.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.844.200	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.844.200	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.016.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.016.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	787.268.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	634.122.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.900.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	160.723.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	447.499.500	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	153.146.000	
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	153.146.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.027.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.027.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.027.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.600.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	77.600.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	77.600.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.400.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.400.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.400.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KANTOR KECAMATAN TAPALANG	5.532.190.060	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KANTOR KECAMATAN TAPALANG	5.532.190.060	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.996.091.060	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.294.400	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.413.600	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.493.200	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.361.200	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.311.200	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.311.200	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.404.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.100.695.820	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.099.111.820	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.584.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.018.400	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.018.400	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.572.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.550.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.022.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.200.240	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.488.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.781.400	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.039.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.820.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.440.840	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.590.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.040.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.514.200	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.855.200	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	28.610.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.989.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.060.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.122.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.138.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.224.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.760.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.674.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.620.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.530.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.524.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.449.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.742.600	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.742.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.707.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.707.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.500.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.500.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.031.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	468.400.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.329.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.329.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.329.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.436.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.436.400	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.436.400	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.884.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.884.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.884.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	1.880.202.669	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	1.880.202.669	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.818.080.469	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.388.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.597.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.961.800	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.179.600	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.479.600	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.169.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.438.443.069	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.430.202.669	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.135.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.105.200	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.637.600	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.637.600	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.650.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.650.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.725.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.240.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.147.900	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.138.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.916.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.722.400	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.260.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.300.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.132.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.122.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	38.010.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.163.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.255.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.908.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.941.200	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.440.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.501.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.748.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.101.600	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.101.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.646.600	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.646.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.456.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.456.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.456.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.900.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.900.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.900.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.018.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.018.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.840.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.178.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KANTOR KECAMATAN KALUKKU	7.838.800.699	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KANTOR KECAMATAN KALUKKU	7.838.800.699	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.784.836.219	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.489.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.196.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.366.200	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.558.600	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.151.400	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.217.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.693.204.173	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.682.992.173	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.212.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.694.093	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.254.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.955.725	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.449.120	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.757.148	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.342.200	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.935.900	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.516.120	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.462.880	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	77.099.240	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.954.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.821.533	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.729.533	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.092.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.110.500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.480.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.530.500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.578.700	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.381.900	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.381.900	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	27.196.800	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.196.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.948.648.180	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.968.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.968.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.932.680.180	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.284.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.111.803.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	813.592.380	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.072.800	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.072.800	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.072.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.974.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.974.800	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22.974.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.690.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.690.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.690.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KANTOR KECAMATAN PAPALANG	2.159.127.399	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KANTOR KECAMATAN PAPALANG	2.159.127.399	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.085.679.399	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.884.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.555.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.823.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.040.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.915.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.728.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.823.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.751.090.399	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.709.127.399	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.856.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.107.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.675.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.675.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.400.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.333.860	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.503.100	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.491.760	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.230.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.368.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.810.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.656.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.235.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.410.720	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.320.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16.590.720	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.155.880	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.155.880	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.728.740	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.200.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.859.440	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.669.300	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.576.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.589.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.589.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.987.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.869.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.118.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.259.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.259.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.259.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.671.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.671.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.671.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.082.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.082.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27.082.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.860.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.860.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.860.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	1.828.786.300	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	1.828.786.300	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.747.780.550	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.498.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.220.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.958.400	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.946.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.843.200	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.062.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.468.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.423.554.300	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.378.786.300	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.798.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.675.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.295.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.633.973	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.913.973	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.720.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.275.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.275.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.512.728	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.470.075	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.588.653	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.432.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.482.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.560.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.660.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.085.200	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.152.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.673.200	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.700.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.560.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.214.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.214.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.006.749	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.935.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.791.749	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.280.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.165.750	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.186.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.186.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.979.750	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.271.750	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.708.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.836.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	17.836.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.836.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.148.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.148.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	13.148.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.856.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.856.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.856.000	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	2.080.231.790	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	2.080.231.790	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.975.015.601	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.749.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.611.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.679.800	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.890.800	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.414.200	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.462.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.690.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.504.895.671	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.480.231.971	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.663.700	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.890.600	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.350.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.540.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.842.130	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.758.550	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.451.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.473.080	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.095.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.064.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.638.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.828.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.810.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.766.189	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.080.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48.080.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.686.189	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.686.189	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.500.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.500.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.950.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.950.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.950.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	1.827.283.223	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	1.827.283.223	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.700.218.543	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.412.392	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.986.592	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.091.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.057.999	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.152.001	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.150.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.443.400	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.531.400	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.243.020.023	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.177.283.223	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.958.240	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.332.880	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.501.480	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.944.200	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.363.360	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.363.360	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.252.040	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.252.040	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.998.120	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.120.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.016.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.190.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.900.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.752.120	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.860.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.360.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.606.480	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.620.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.854.480	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.732.000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.312.128	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.312.128	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.254.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.214.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.240.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.036.120	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.384.640	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.168.160	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.216.480	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.871.440	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.760.360	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.111.080	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.780.040	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.780.040	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.359.960	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.359.960	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.359.960	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.177.760	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.177.760	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.177.760	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.490.840	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.490.840	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.291.320	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.199.400	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.000.120	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	1.353.508.242	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.11.0000	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	1.353.508.242	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.273.013.592	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.549.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.249.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.600.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.700.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	761.423.242	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	753.508.242	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.575.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.340.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.500.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.125.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.125.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.432.550	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.160.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.960.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.005.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.231.150	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.075.900	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.813.800	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.608.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	63.705.800	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.480.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.480.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.690.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.450.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.240.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.072.650	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.072.650	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.072.650	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.422.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.422.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	33.422.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20.000.000	
7.01.7.01.7.01.08.0000	KANTOR KECAMATAN TOMMO	2.199.525.414	
7.01.7.01.7.01.08.0000	KANTOR KECAMATAN TOMMO	2.199.525.414	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.171.105.414	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.700.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.700.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.762.525.414	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.750.525.414	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.400.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.470.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.380.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.150.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.300.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.300.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	13.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.860.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.960.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.900.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.320.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.320.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.420.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	15.000.000	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.420.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.420.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.911.643.069	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.911.643.069	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.911.643.069	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.923.601.325	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.660.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.666.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.794.000	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.706.000	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.244.000	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.628.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.622.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.744.073.323	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.693.601.323	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.840.000	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.632.000	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.622.000	
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.622.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.846.002	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.343.002	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.191.400	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.019.200	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.460.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.498.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.014.400	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.800.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.600.000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.600.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	28.117.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	28.117.000	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	28.117.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	716.313.744	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	716.313.744	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	628.041.746	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	88.271.998	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	41.728.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	41.728.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	41.728.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	41.883.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	41.883.000	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27.173.000	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.710.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	160.000.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	160.000.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.245.800	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.754.200	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer ke Desa

Plafon Anggaran Sementara Belanja untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, modal, belanja tidak terduga dan Belanja Transfer ke Desa secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp1.093.861.617.035,00 dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	504.557.786.719
2	Belanja Barang dan Jasa	288.491.388.609
3	Belanja Hibah	9.702.141.058
4	BELANJA MODAL	139.631.790.261
	Belanja Modal Tanah	194.855.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.393.283.079
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.621.138.379
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.321.552.753
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.070.961.050
	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000
5	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
6	Belanja Bagi Hasil	5.034.914.488
7	Belanja Bantuan Keuangan	136.443.595.900
	TOTAL	1.093.861.617.035

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp5.384.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 yang digunakan untuk Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp4.000.000.000,00.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.384.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp1.384.000.000,00.

Rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PRORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.384.000.000,00
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.384.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.384.000.000,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.384.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama yang memberikan gambaran terhadap prioritas pembangunan daerah beserta dengan plafon anggaran sementara yang diproyeksikan pada tahun anggaran berjalan.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mamuju, 11 Agustus 2022

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MAMUJU**


AZWAR ANSHARI HABSI, SE., M.Si
KETUA


SYAMSUDDIN HATTA, SE
WAKIL KETUA

BUPATI MAMUJU


HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

H. ANDI DODY HERMAWAN, SE
WAKIL KETUA